

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PRODUK
DOMESTIK BRUTO RIIL PERKAPITA INDONESIA: SEBELUM DAN
SESUDAH REFORMASI KEUANGAN NEGARA**

(Tesis)

Oleh

**PRAPTI LESTARI
NPM 2021021006**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO RIIL PERKAPITA INDONESIA: SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI KEUANGAN NEGARA

Oleh

Prapti Lestari

Pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara masih menjadi perdebatan baik secara teori maupun studi empiris. Di Indonesia, belanja pemerintah meningkat cukup signifikan, namun pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan. Pemerintah berupaya memperbaiki pengelolaan anggaran dan belanja negara diantaranya dengan melakukan reformasi keuangan negara agar anggaran sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) Riil Perkapita sebagai proksi pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode sebelum dan sesudah reformasi keuangan negara. Selain itu, beberapa variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga diteliti, yaitu tenaga kerja, investasi pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Penelitian ini menggunakan sampel tahun 1985-2019 dengan menggunakan *Error Correction Model* (ECM). Hasil penelitian menunjukkan investasi pemerintah, PMTB dan reformasi keuangan negara berpengaruh signifikan terhadap PDB Riil Perkapita. Uji tanda menunjukkan seluruh variabel dalam penelitian ini, yaitu belanja pemerintah, investasi pemerintah, PMTB, tenaga kerja, dan reformasi keuangan negara berpengaruh positif terhadap PDB Riil Perkapita. Reformasi keuangan negara berdampak positif terhadap PDB Riil Perkapita melalui perbaikan pengelolaan anggaran dan belanja pemerintah yang semakin detil dan transparan.

Belanja pemerintah dan tenaga kerja meski bertanda positif namun tidak berpengaruh signifikan diantaranya karena belanja negara belum efisien, masih adanya kasus korupsi dan penumpukan belanja di akhir tahun. Secara nominal, nilai belanja pemerintah juga sangat kecil dibandingkan PDB Riil Perkapita. Sementara kualitas pekerja Indonesia yang relatif rendah pendidikan dan produktivitasnya menjadi masalah yang harus diselesaikan. Oleh karenanya, pemerintah perlu terus memperbaiki pengelolaan anggaran dan meneruskan reformasi keuangan negara dan meningkatkan program Wajib Belajar hingga Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kerja sehingga dapat mendorong meningkatnya PDB Riil Perkapita.

Kata kunci: PDB Riil Perkapita, belanja negara, reformasi keuangan negara

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT PERCAPITA INDONESIA: BEFORE AND AFTER STATE FINANCIAL REFORM

By

PRAPTI LESTARI

The effect of government expenditure on a country's economic growth is still a matter of debate both theoretically and empirically. In Indonesia, government expenditure increased significantly, but economic growth tends to stagnate. The government seeks to improve the management of state budgets and expenditures, including by reforming state finances so that the budget as an instrument of fiscal policy can encourage economic growth. This study uses Real Gross Domestic Product (GDP) per capita as a proxy for economic growth. The purpose of this study is to analyze the effect of government spending on economic growth in the period before and after the reform of state finances. In addition, several other variables that affect economic growth are also investigated, namely labor, government investment, and Gross Fixed Capital Formation (PMTB).

This study uses a sample of 1985-2019 using the Error Correction Model (ECM). The results of the study show that government investment, PMTB and state financial reform have a significant effect on Real GDP Per capita. The sign test shows that all variables in this study, namely government expenditure, government investment, PMTB, labor, and state financial reform have a positive effect on Real GDP Per capita. Reform of state finances has a positive impact on Real GDP per capita through improved management of budgets and government expenditures that are increasingly detailed and transparent.

Government expenditure and labor even though they have a positive sign but have no significant effect, among others, because state spending is not yet efficient, corruption cases still exist and spending accumulation at the end of the year. In nominal terms, the value of government expenditure is also very small compared to Real GDP Per capita. Meanwhile, the quality of Indonesian workers who are relatively low in education and productivity is a problem that must be resolved. Therefore, the government needs to continue to improve budget management and continue to reform state finances and increase the Compulsory Education program to Higher Education to improve the quality of workforce education so that it can encourage an increase in Real GDP per capita.

Keywords: Real GDP Per capita, government expenditure, state financial reform

Judul Tesis : **PENGARUH BELANJA PEMERINTAH
TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO RIIL
PERKAPITA INDONESIA: SEBELUM DAN
SESUDAH REFORMASI KEUANGAN NEGARA**

Nama Mahasiswa : **Prapti Lestari**

No. Pokok Mahasiswa : 2021021006

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.
NIP 19560325 198303 1 002

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP 19631215 198903 2 002


2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Marsellina, S.E., M.P.M.
NIP 19670710 199003 2 001

MENGESAIHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si. 

Sekretaris : Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. 

Anggota : Dr. Marselina, S.E., M.P.M. 

Anggota : Dr. Ambya, S.E., M.Si. 



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003



3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005

4. Tanggal Lulus Ujian : 13 Mei 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Juli 2022

Penulis



Prapti Lestari

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 20 Juli 1987 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ratno Partoyo dan Ibu Sarjini (Alm).

Penulis menamatkan pendidikan jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan studi di jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dan lulus tahun 2009.

Sejak tahun 2015 penulis bekerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan hingga sekarang. Kini penulis ditugaskan di KPPN Baturaja. Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur mandiri.

MOTTO

Permudah urusan dengan orang lain,
insya Allah urusanmu akan dimudahkan

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah membimbingku hingga saat ini. Dengan kerendahan hati, karya ini kupersembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

Suamiku, Muhammad Yunus dan kedua anakku, Haikal Abqary Mannaf dan Haziq Kiano Munaf,
Bapak dan Adikku yang selalu tulus membantu dan memberikan dukungan, semangat, dan doa.

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Magister Ilmu Ekonomi yang telah memberikan motivasi, ilmu yang bermanfaat serta nasihat yang sangat membantu dan membangun.

Seluruh keluarga, sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan di setiap prosesnya.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto Riil Perkapita Indonesia: Sebelum dan Sesudah Reformasi Keuangan Negara” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian tesis ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M. Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen Pembahas I.
3. Bapak Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E.,M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan nasihat dalam penyelesaian tesis ini.
4. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II.

5. Bapak Dr. Ambya, S.E, M.Si selaku Dosen Pembahas 2.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung.
7. Suamiku, Muhammad Yunus yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan, bantuan, dan doa agar tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Juga kedua anakku, Haikal Abqary Mannaf dan Haziq Kiano Munaf yang selalu mendukung, menjadi penyemangat, dan selalu memaklumi kesibukan bunda dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak dan Mamak (Alm) yang tak pernah lelah memberikan doa tulus dan ikhlas. Terimakasih tak terhingga untuk setiap perjuangan, kasih sayang, pengorbanan serta kesabaran Bapak dan Mamak dalam membimbing anakmu hingga saat ini.
9. Adikku, Lili Chrisnawati terimakasih atas segala bantuannya dalam proses penyelesaian tesis ini.
10. Mba Sella Merista, staf administrasi Magister Ilmu Ekonomi, terima kasih atas bantuannya selama kuliah sampai tesis ini selesai.
11. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan yang telah banyak memberikan bantuan serta pelayanan terbaik untuk kelancaran proses penyelesaian tesis ini.

12. Teman-teman mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi angkatan 2020 yang selalu kompak dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan do'a yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 15 Juli 2022
Penulis,

Prapti Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	14
I.3. Tujuan Penelitian	17
I.4. Manfaat Penelitian.....	17
I.5. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN LITERATUR	20
II.1. Tinjauan Pustaka.....	20
II.1.1 Teori Keynes: Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian	20
II.1.2 Teori Pertumbuhan Endogen	22
II.1.3 Teori Pertumbuhan Endogen dengan Belanja Pemerintah.....	25
II.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah	27
II.1.5 Reformasi Keuangan Negara: Paket Undang-Undang Keuangan Negara.....	31
II.1.6 Format Baru Belanja Negara	34
II.1.7 Klasifikasi berdasarkan Organisasi.....	36
II.1.8 Tiga Pilar Penganggaran	38
II.2. Penelitian Terdahulu	41
II.3. Kerangka Pemikiran	51
II.4. Hipotesis Penelitian	55
III. METODOLOGI.....	56
III.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	56
III.2. Definisi Operasional Variabel	57
III.2.1 Produk Domestik Bruto Riil Perkapita (GDP)	57
III.2.2 Belanja Pemerintah Riil Perkapita (Govex).....	57
III.2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto Riil Perkapita (PMTB)	58
III.2.4 Investasi Pemerintah (PUB).....	58
III.2.5 Tenaga Kerja (EMP).....	59
III.2.6 <i>Dummy</i>	59
III.3. Sampel	60

III.4. Spesifikasi Model	61
III.5. Metode Analisis Data	63
III.5.1 Analisis Data dengan Error Correction Model (ECM)	64
III.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	69
III.5.3 Uji Statistik/Uji Hipotesis	71
III.5.4 Evaluasi Kriteria Ekonomi.....	72
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	73
IV.1. Gambaran Umum Sebelum dan Sesudah Reformasi Keuangan Negara	74
IV.2. Hasil.....	78
IV.2.1 Hasil Regresi Data	79
IV.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	83
IV.2.3 Uji Statistik	88
IV.3. Pembahasan	93
IV.3.1 Pengaruh Belanja Pemerintah (GOVEX) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	93
IV.3.2 Pengaruh Investasi (PMTB) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	105
IV.3.3 Pengaruh Investasi Pemerintah (PUB) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	107
IV.3.4 Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	109
IV.3.5 Pengaruh Reformasi Keuangan Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	114
IV.4. Implikasi Kebijakan.....	119
IV.5. Ringkasan Hasil	123
V. SIMPULAN DAN SARAN	124
V.1. Simpulan	124
V.2. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1.	Perbandingan Format Belanja Sesudah UU No. 17 Tahun 200336
2.2.	Sistem Penganggaran Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 17 tahun 2003 37
2.3.	Perbandingan Format Lama dan Format Baru APBN..... 39
2.4.	Penelitian Terdahulu..... 41
3.1.	Variabel dan Sumber Data 57
4.1.	Statistik Deskriptif Data Sebelum Reformasi Keuangan Negara..... 77
4.2.	Statistik Deskriptif Data Sesudah Reformasi Keuangan Negara..... 77
4.3.	Ringkasan Hasil Uji Stasioneritas 79
4.4.	Hasil Model Regresi 81
4.5.	Hasil Uji Kointegrasi..... 82
4.6.	Model <i>Error Correction Mechanism</i> (ECM) 83
4.7.	Hasil Uji Linearitas 84
4.8.	Hasil Uji Multikolinearitas 85
4.9.	Hasil Uji Autokolinearitas 86
4.10.	Hasil Regresi dengan HAC 87
4.11.	Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 88
4.12.	Hasil Regresi ECM..... 89
4.13.	Perubahan Format APBN 115
4.14.	Ringkasan Hasil Regresi 123

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1985-2019 (%) 2
1.2.	PDB Riil Perkapita Indonesia Tahun 1985-2019 (juta Rupiah).... 3
1.3.	Total Belanja Pemerintah Indonesia Tahun 1973-2019 (Miliar Rupiah)..... 5
1.4.	Konsumsi Pemerintah Perkapita Indonesia, 1985-2019 (Rupiah)..... 6
1.5.	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, 1985-2019 (%)..... 11
1.6.	Produk Domestik Bruto/Pekerja di Indonesia dan Beberapa Negara Asia Tenggara, 1991-2019 (dalam Dolar, harga konstan 2017) 13
2.1.	Hukum Wagner 29
2.2.	Kerangka Konseptual Penganggaran Berbasis Kinerja 40
2.3.	Kerangka Pemikiran 54
4.1.	Hasil Uji Normalitas 84
4.2.	<i>Error Correction Term</i> 92
4.3.	Alokasi Anggaran Pendidikan (Miliar Rupiah) dan Rasio Anggaran pendidikan terhadap Total Belanja Negara (%), tahun 2010-2019 96
4.4.	Realisasi Anggaran Infrastruktur (Triliun Rupiah) dan Rasio Anggaran Infrastruktur terhadap Total Belanja Negara (%), tahun 2015-2019 97
4.5.	Realisasi Anggaran Kesehatan (Miliar Rupiah) dan Rasio Anggaran Kesehatan terhadap Total Belanja Negara (%), tahun 2010-2019 99
4.6.	Jumlah Kasus Korupsi Indonesia, 2004-2019 103
4.7.	Realisasi Per Triwulan Belanja Pemerintah Tahun 1985-2016 105
4.8.	PMTB Riil Perkapita (dalam Rupiah) dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (dalam %) Tahun 1985-2019 107
4.9.	Persentase Pekerja Berpendidikan pada Tingkat SD dan di bawahnya, 1986-2005 110
4.10.	Persentase Pekerja Berpendidikan Tertinggi pada Tingkat SD dan di bawahnya, 2008-2019..... 111
4.11.	PDB Riil per Pekerja Negara-Negara ASEAN (Dolar), 1991-2019 112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Data	xiv
2.	Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews.....	xv
3.	Regresi Jangka Panjang (Kointegrasi)	xxii
4.	Uji Kointegrasi (<i>unit root</i> ECT).....	xxiii
5.	Regresi <i>Error Correction Mechanism</i> (ECM)	xxiv
6.	Uji Asumsi Klasik	xxv
7.	<i>Treatment</i> Autokolinearitas: <i>Newey West/HAC Standard</i> <i>Error</i>	xxviii
8.	Anggaran Pendidikan 2010-2019.....	xxix
9.	Anggaran Kesehatan 2010-2019	xxx

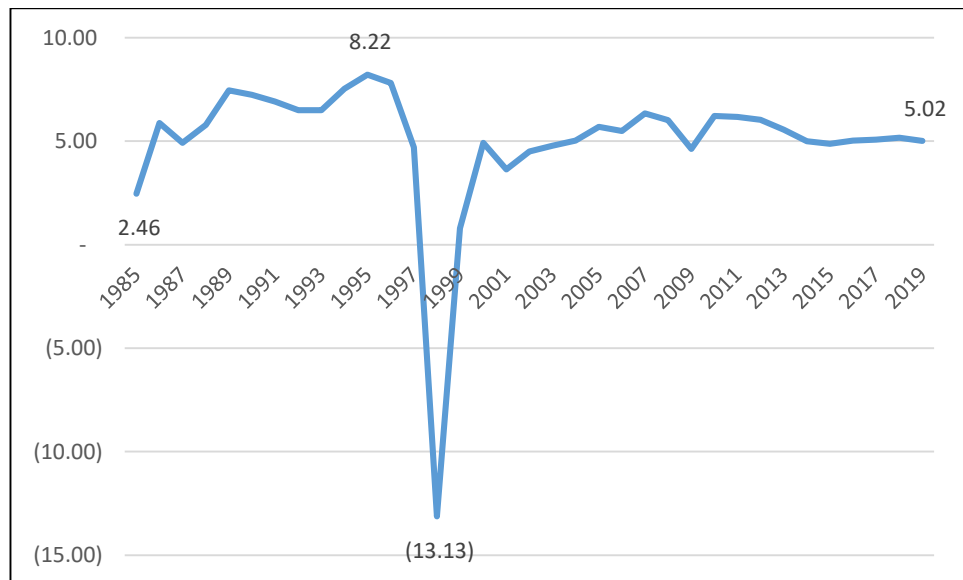
I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan topik penting yang menjadi perhatian seluruh negara karena digunakan sebagai salah satu indikator kemajuan negara. Pertumbuhan ekonomi berarti terjadi peningkatan kapasitas produksi sehingga negara mampu menyediakan barang publik untuk masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian berdampak pada peningkatan pendapatan riil masyarakat di suatu negara, menaikkan pendapatan masyarakat sehingga standar hidup masyarakat semakin baik dan kesejahteraan meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Produk Domestik Bruto harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun selain menggunakan data pertumbuhan ekonomi negara secara langsung.

Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat cukup fluktuatif. Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 1981-1991 sedikit menurun dibandingkan periode 1970-1980, dengan rata-rata pertumbuhan adalah 5.64% per tahun. Rata-rata ini jauh lebih rendah dibandingkan era 1970-1980 dimana perekonomian Indonesia mampu tumbuh hingga 9.88% di tahun 1980. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan harga minyak dunia yang mencapai titik terdalam pada tahun 1985-1986. Penurunan harga minyak ini telah mengurangi anggaran pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk mengejar kebijakan industrialisasi yang berorientasi ke dalam negeri (Bayhaqi, 2006).

Periode 1992-1996 adalah periode *overheating economy* bagi Indonesia setelah kebijakan deregulasi perbankan. Pertumbuhan ekonomi kembali tinggi dengan rata-rata 7.31% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi di tahun 1995 yaitu 8.22%. Di tahun 1997, pertumbuhan ekonomi jauh menurun dari 7.82% di tahun 1996 menjadi 4,70 persen. Kondisi ini semakin menurun dan terpuruk di tahun 1998 dimana perekonomian Indonesia dihantam krisis ekonomi yang melanda hampir di seluruh dunia hingga perekonomian Indonesia mengalami kontraksi terdalam mencapai -13.13%.



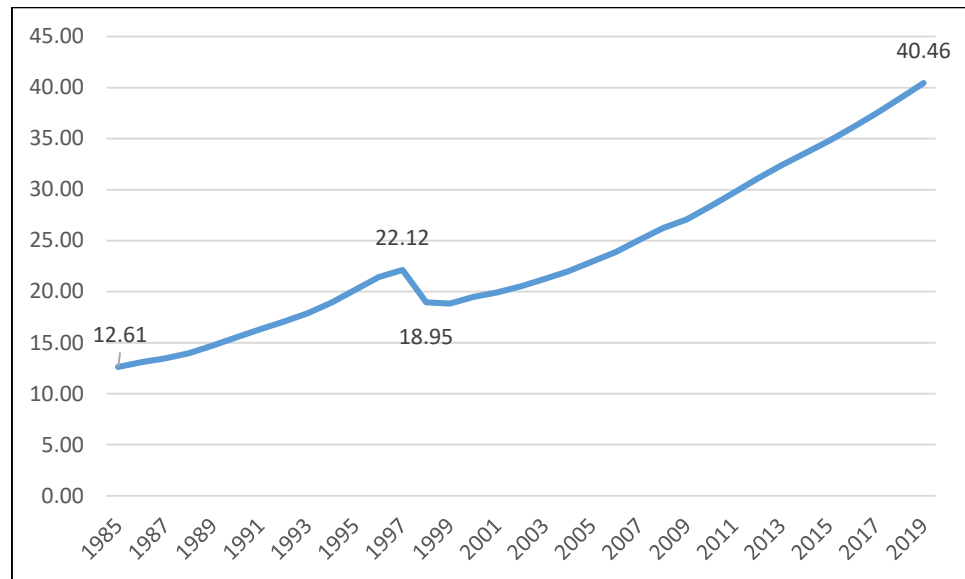
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1985-2019 (%)

Setelah mengalami keterpurukan, perlahan perekonomian Indonesia bangkit. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat kembali tinggi seperti periode sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2001-2019 berada dikisaran 5.28% per tahun.

PDB riil per kapita berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu negara. Meski tren pertumbuhan ekonomi

cenderung menurun, PDB riil perkapita Indonesia pada periode 1985-2019 terus mengalami peningkatan.



Sumber : World Bank

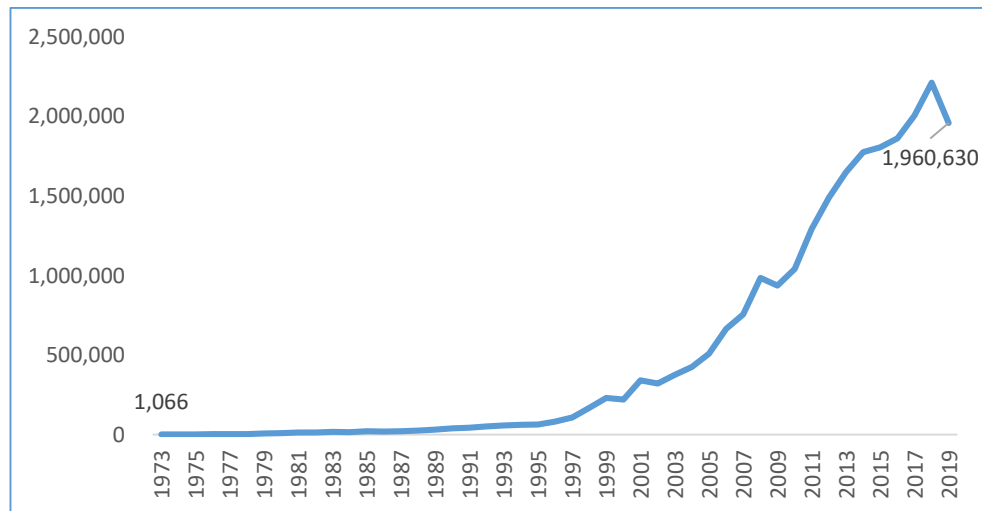
Gambar 1.2 : PDB Riil Perkapita Indonesia Tahun 1985-2019 (juta Rupiah)

Pemerintah memainkan peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian antara lain membangun infrastruktur, pemberian subsidi, dan stabilisasi harga (Bayhaqi, 2006). Sebagai salah satu indikator perekonomian, pemerintah Indonesia terus mengupayakan tercapainya target pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Berbagai cara dilakukan, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai teori ekonomi Keynes, belanja pemerintah dapat menstimulus perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat (*agregat demand*) di masyarakat. Pengeluaran pemerintah adalah bentuk intervensi pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi alokasi melalui koreksi kegagalan pasar, mendistribusikan sumber daya secara adil, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas. Menurut aliran Keynesian, pengeluaran pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini

menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian secara agregat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Ambya, 2020). Oleh karena itu, belanja pemerintah berperan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi.

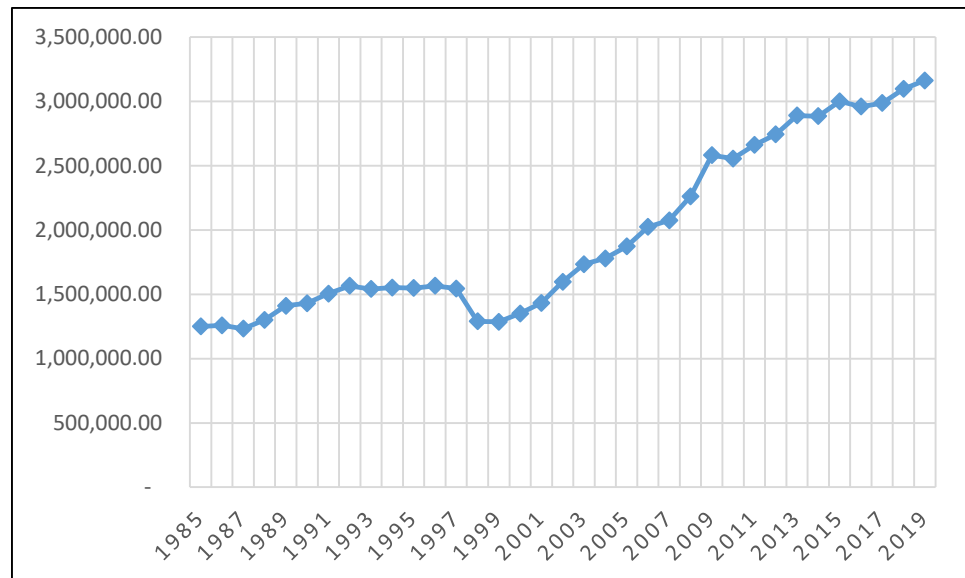
Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis diantara berbagai pilar kebijakan lainnya dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) termasuk target pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah tersebut, pemerintah dapat secara langsung melakukan intervensi anggaran (*direct budget intervention*) untuk mencapai sasaran-sasaran program pembangunan yang ditetapkan pemerintah (Hadi et al., 2014). Dengan demikian, belanja pemerintah melalui APBN diharapkan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di Indonesia, besaran belanja pemerintah melalui APBN meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun 1973 sampai 2019, secara nominal belanja pemerintah telah naik signifikan dari Rp1,07 triliun menjadi dikisaran Rp1.961 triliun. Kenaikan terjadi pada seluruh komponen belanja, termasuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Pengeluaran rutin yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan belanja lainnya di tahun 1973 sebesar 577 miliar dan meningkat menjadi Rp1.342 triliun pada 2019. Jenis belanja modal juga mengalami kenaikan, namun tidak sebesar peningkatan pada belanja rutin, yaitu dari Rp287.7 milyar menjadi Rp189.34 triliun. Hal ini menunjukkan pada periode ini peningkatan belanja yang bersifat operasional justru lebih tinggi dibandingkan kenaikan belanja produktif.



Sumber : Kementerian Keuangan
 Gambar 1.3 : Total Belanja Pemerintah Indonesia Tahun 1973-2019 (Miliar Rupiah)

Data juga menunjukkan *government expenditure* sebagai salah satu komponen dalam perhitungan Produk Domestik Bruto trennya juga terus meningkat. Dengan menggunakan data dalam satuan harga konstan, dapat dibandingkan kenaikan konsumsi pemerintah dari tahun ke tahun. Konsumsi pemerintah perkapita di tahun 1985 hanya sebesar Rp1.250.040,00 dan terus meningkat hingga Rp3.162.782,00 di tahun 2019. Konsumsi pemerintah ini memiliki porsi cukup besar dalam pembentukan PDB dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk penyediaan infrastruktur publik, menyediakan pendidikan, dan pengeluaran produktif lainnya, maka meningkatnya *government expenditure* diharapkan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Teori pertumbuhan endogen juga menekankan perlunya pemerintah memberikan insentif dan subsidi bagi pelaku usaha di sektor swasta yang akan memotivasi sektor swasta untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan sehingga dapat mendorong inovasi.



Sumber : *World Development Indicators*
 Gambar 1.4 : Konsumsi Pemerintah Perkapita Indonesia, 1985-2019 (Rupiah).

Dalam rangka mengoptimalkan peran belanja pemerintah dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus memperbaiki kinerja pengelolaan anggaran. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan anggaran yang semakin baik, target pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tercapai. Perbaikan dalam pengelolaan anggaran diantaranya dilakukan melalui reformasi tata kelola keuangan negara yang ditandai dengan diterbitkannya Paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 17 tahun 2003, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu

Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl.1925 No.448. Ketentuan Peraturan warisan Belanda ini masih terdapat banyak kelemahan. Kelemahan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang berakibat kurang optimalnya belanja pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam penjelasan UU No.17 tahun 2003 disebutkan bahwa disahkannya UU No.17 tahun 2003 merupakan upaya menghilangkan penyimpangan dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (*sustainable*) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Reformasi keuangan negara ini juga dapat dipandang sebagai perbaikan institusi yang pada akhirnya diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meski belanja pemerintah terus meningkat signifikan dan terus diperbaiki pengelolaannya, data menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kurun waktu 1985-2019 fluktuatif dan cenderung semakin menurun. Belanja pemerintah di Indonesia belum mampu memberikan daya ungkit yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Reformasi keuangan negara telah dimulai pada tahun 2003 dan perubahan fundamental telah dibuat guna menciptakan tata kelola keuangan yang baik sesuai standar internasional, yaitu didasarkan pada prinsip *good governance* dan *clean governance*, namun di tataran implementasinya masih kurang optimal. Hal ini diantaranya tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004 hingga 2009 adalah *disclaimer* (tidak menyatakan pendapat). Menurut BPK, LKPP pada periode tersebut tidak sesuai dengan standar transparansi dan akuntabilitas. Berbagai bentuk penyimpangan anggaran (korupsi) yang masih relatif banyak terjadi juga menjadikan anggaran tidak optimal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Peran belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Dalam kasus Indonesia, belanja

pemerintah terus meningkat dari waktu ke waktu dan jelas dinyatakan bahwa salah satu fungsi anggaran adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kajian teoritis dan empiris juga masih membuka ruang diskusi yang luas mengingat teori dan data empiris juga menyimpulkan hasil yang berbeda-beda dalam analisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi memperlihatkan hasil yang berbeda di berbagai penelitian karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu negara yang menjadi sampel, tingkat pembangunan di negara tersebut, variabel yang dimasukkan dalam model serta metodologi yang digunakan. (Alqadi & Ismail, 2019). Reviu literatur terhadap kajian teoritis dan empiris oleh Nyasha & Odhiambo (2019) juga menunjukkan pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan kesimpulan yang berbeda-beda, ada yang positif, negatif, maupun netral.

Belanja pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara diantaranya dibuktikan pada penelitian Mazurova & Kollar (2015). Penelitiannya menggunakan angka pengganda pengeluaran menyatakan belanja pemerintah menstimulus pertumbuhan ekonomi, bahkan saat terjadi krisis. Penelitian di Kosovo juga menunjukkan hasil serupa yaitu pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut (Pula & Elshani, 2018).

Beberapa studi empiris lainnya menyimpulkan beberapa jenis belanja pemerintah justru berpengaruh negatif terhadap perekonomian. Studi yang dilakukan Devarajan et al., (1996) menunjukkan bahwa untuk 40 negara berkembang yang menjadi sampel, total belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan perkapita. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hasnul (2016) menunjukkan pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif di Malaysia untuk data 1970-2014. R. J. Barro (1991) menggunakan data panel negara-negara di dunia menghasilkan kesimpulan bahwa persentase belanja

pemerintah terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam analisis tersebut, belanja pemerintah dibagi dalam dua kategori, yaitu belanja produktif dan belanja tidak produktif. Analisis kualitatif yang dilakukan oleh D. J. Mitchell (2005) juga menunjukkan hubungan negatif antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, diantaranya karena semakin tinggi belanja pemerintah justru akan menggeser peran investasi swasta dalam perekonomian.

Perbaikan institusi juga memiliki peran penting untuk menjadikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap perekonomian negara. Di Indonesia, upaya perbaikan institusi terutama dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara diantaranya dilakukan melalui reformasi keuangan negara. Sebuah penelitian di Nigeria menunjukkan dalam jangka pendek, tidak ada hubungan yang signifikan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, salah satunya karena penyalahgunaan anggaran. (K.C et al., 2018). Kualitas kelembagaan yang baik memiliki dua efek utama, yaitu mendorong investasi keseluruhan yang lebih tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan membatasi kegiatan kelompok yang terlibat dalam perampasan sumber daya secara ilegal. Bukti empiris menunjukkan bahwa faktor kelembagaan (aturan hukum, kebebasan politik, dll) memainkan peran penting dalam kinerja ekonomi suatu negara. Sebaliknya, kualitas kelembagaan yang rendah mendukung perilaku mencari keuntungan dalam eksploitasi sumber daya alam, meningkatnya korupsi dan distorsi alokasi dana publik (Vedia-Jerez & Chasco, 2016).

Selain masalah kelembagaan, korupsi dan kualitas pemerintahan yang buruk adalah dua faktor penting lainnya yang berkontribusi pada ketidakberlanjutan pertumbuhan ekonomi di Indonesia antara tahun 1962 dan 2004. Korupsi tidak hanya sangat meluas di era orde baru, tetapi juga di era reformasi setelah masa krisis. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa, di era reformasi, baik korupsi maupun kualitas buruk pemerintahan lebih dominan dibandingkan

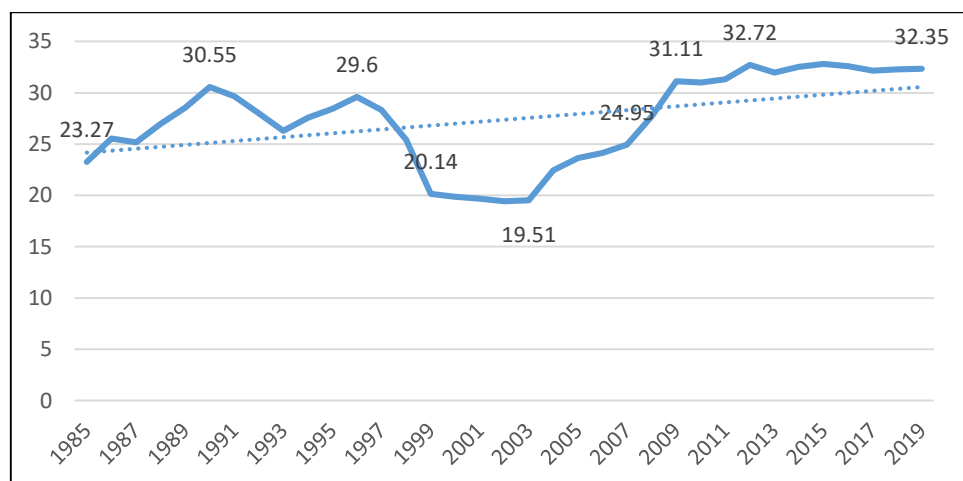
periode-periode sebelumnya (McCarthy, 2005). Oleh karenanya reformasi keuangan negara sebagai salah satu upaya perwujudan *good governance* sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Selain melalui konsumsi pemerintah, intervensi pemerintah terhadap perekonomian juga dapat berupa investasi (*public investment*). Investasi pemerintah yang tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dilakukan pemerintah termasuk kedalam pengeluaran produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur sebagai input produksi sektor swasta. Rata-rata persentase investasi pemerintah terhadap PDB Indonesia pada 1985-2019 adalah 3% per tahun. Angka ini relatif kecil dibandingkan dengan porsi investasi swasta. Beberapa penelitian menyatakan porsi investasi pemerintah yang cukup besar justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Investigasi oleh Phetsavong & Ichihashi (2012) menemukan investasi pemerintah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena investasi yang dilakukan pemerintah justru mengurangi dampak positif dari *Foreign Direct Investment* (FDI) dan investasi swasta domestik. Selain menitikberatkan pengaruh belanja pemerintah terhadap perekonomian, Robert J. Barro (1990) juga menggunakan variabel investasi, baik investasi swasta maupun investasi pemerintah. Hasil penelitiannya menyimpulkan persentase investasi pemerintah terhadap PDB tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun pengaruhnya adalah positif.

Selain belanja pemerintah baik melalui konsumsi maupun investasi, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor lainnya. Teori pertumbuhan ekonomi endogen misalnya, menyatakan modal (kapital) dan tenaga kerja (labor) sebagai faktor produksi yang meningkatkan output perekonomian dan pertumbuhan ekonomi, selain juga perkembangan teknologi. Dalam teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan Robert J. Barro (1990), modal/investasi menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi bersama dengan belanja dan investasi pemerintah.

Modal merupakan input penting dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan modal akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga mendorong perekonomian tumbuh. Modal/investasi yang dimaksud merupakan modal/investasi dalam arti luas, baik modal fisik maupun *human capital*. Modal fisik dapat diproksi dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB terbentuk akibat dari adanya kegiatan investasi, dimana sebagian dari investasi dibelanjakan untuk membeli barang modal dan persediaan yang akan digunakan dalam kegiatan produksi atau proses produksi. Oleh karena itu, investasi merupakan suatu bagian penting dalam suatu perekonomian karena investasi mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi berarti kapasitas produksi juga meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan output dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat (BPS, 2019).

Di Indonesia, *share* PMTB terhadap PDB di tahun 1985 sampai 2019 trennya meningkat. Di tahun 1985, porsi PMTB terhadap PDB Indonesia adalah 23.27% dan naik menjadi 32.29% di tahun 2019 yang mengindikasikan peningkatan investasi fisik pada periode tersebut.



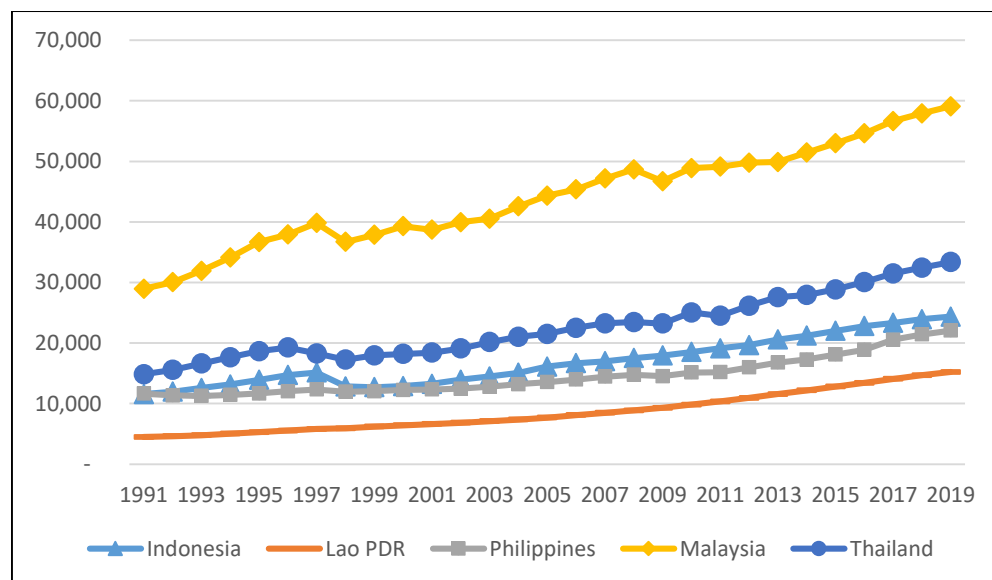
Sumber : *World Development Indicator*
 Gambar 1.5 : Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, 1985-2019 (%).

Penelitian empiris telah banyak dilakukan terkait pengaruh investasi/modal fisik terhadap pertumbuhan ekonomi. Wahyuni (2015) menggunakan variabel PMTB untuk memproksi investasi fisik dan menunjukkan PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Pasifik. Studi Amri (2017) membuktikan PMTB yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pada *lag* 1 dan *lag* 2 dan hubungan antara PMTB dan GDP dapat terjadi dua arah. Santika & Qibthiyah (2020) juga menyimpulkan peningkatan investasi (PMTB) akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PMTB) perkapita.

Tenaga kerja (*labor*) sebagai input dalam produksi juga berperan besar dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan berasal dari peningkatan produktivitas pekerja. Melalui pekerja, teknologi sebagai penentu pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, akan terserap. Indonesia memiliki keunggulan dalam hal *supply* tenaga kerja dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Seiring dengan jumlah penduduk yang meningkat, jumlah pekerja yang aktif dalam perekonomian juga meningkat dari tahun ke tahun. Data yang bersumber dari *Penn World Table* menunjukkan, jumlah pekerja di Indonesia di tahun 1985 berjumlah 28.5 juta orang dan terus meningkat hingga mencapai 131 juta orang di tahun 2019. Namun demikian, melimpahnya *supply* tenaga kerja ataupun jumlah pekerja yang aktif di perekonomian belum tentu optimal meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini karena produktivitas dan kualitas pekerja Indonesia belum cukup baik sehingga belum signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, produktivitas tenaga kerja yang diproksi dari Produk Domestik Bruto per pekerja, produktivitas pekerja Indonesia masih dibawah Malaysia dan Thailand. Selain itu, tingkat pendidikan pekerja Indonesia juga masih relatif rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 1986 lebih dari 80% pekerja adalah lulusan Sekolah Dasar dan pendidikan dibawahnya. Meskipun kondisi ini telah jauh lebih baik, jumlah pekerja lulusan SD atau dibawahnya masih mencapai 40% di tahun 2019. Melalui pengelolaan anggaran yang lebih terarah, sejak tahun 2009 pemerintah Indonesia telah

mewajibkan alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan *human capital* sekaligus memperbaiki kualitas dan produktivitas pekerja di Indonesia, mengingat pentingnya produktivitas pekerja dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Studi empiris telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh *labor* terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya Ambya (2021), Salihin (2020), dan Ahdini & Mandala (2020). Ketiga studi empiris tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa jumlah pekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



Sumber : *World Development Indicator*

Gambar 1.6 : Produk Domestik Bruto/Pekerja di Indonesia dan Beberapa Negara Asia Tenggara, 1991-2019 (dalam Dolar, harga konstan 2017).

Berdasarkan beberapa fakta diatas, penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia terutama setelah dilaksanakan reformasi keuangan negara. Periode penelitian dibagi menjadi dua yaitu periode sebelum reformasi keuangan negara dan periode setelah reformasi keuangan negara. Reformasi keuangan negara merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola

keuangan Negara. Dalam penjelasan UU No.17 Tahun 2003 disebutkan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran diantaranya berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, seharusnya pengelolaan keuangan negara akan semakin baik, transparan dan efisien setelah reformasi keuangan negara. Sistem pengelolaan dan Undang-Undang keuangan negara semakin detil mengatur pengelolaan anggaran, sehingga diharapkan pengaruh belanja negara jauh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi setelah adanya reformasi keuangan negara. Berbagai perbaikan dalam sistem penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran diharapkan mampu meningkatkan daya ungkit belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun penelitian Suryanto & Kurniati (2019) menyatakan implementasi penganggaran berbasis kinerja sesuai amanat UU No.17 tahun 2003 masih jauh dari ekspektasi dan masih sebatas memuhi ketentuan. Penelitian ini juga akan memasukkan variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu investasi modal fisik dan tenaga kerja.

I.2. Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai kesejahteraan dan kinerja pemerintah di bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan PDB riil yang berarti meningkatnya pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu komponen dalam pembentukan PDB seharusnya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terkait dengan peranan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*promote growth*).

Secara nominal, jumlah pengeluaran pemerintah setiap tahun terus meningkat. Menurut Bappenas, realisasi belanja negara terus mengalami peningkatan dari hanya Rp1.294 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp2.269 triliun pada tahun 2018. Namun pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu

tersebut justru menurun dari 6,16 persen di tahun 2011, menjadi 4,88 persen di tahun 2015, dan sedikit meningkat di tahun 2018 menjadi 5,17 persen.

Sebelum tahun 2005, pengelolaan keuangan negara masih menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Selama berlakunya peraturan perundangan tersebut, telah terjadi banyak penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara, salah satunya karena laporan keuangan bersifat umum dan tidak terperinci yang memberi celah bagi penyelewengan. Kinerja Kementerian/Lembaga Negara dinilai dari keberhasilannya mengumpulkan dan membelanjakan penerimaan atau pengeluaran sesuai anggaran. Akibat laporan yang tidak terperinci dan penilaian kinerja yang sangat minim ini, praktik korupsi merajalela dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tinggi di dunia pada tahun 2019 yaitu peringkat 85 dari 180 negara.

Berbagai permasalahan yang muncul terkait tata kelola keuangan negara mendorong pemerintah melakukan reformasi keuangan negara. Langkah nyata yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan paket perundang-undangan di bidang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU No.15 tahun 2015 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Namun demikian, melihat data pertumbuhan ekonomi dalam 15 tahun setelah reformasi tersebut, belanja pemerintah yang terus meningkat belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain belanja pemerintah, terdapat beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Investasi, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, serta tenaga kerja merupakan input penting dalam perekonomian. Data untuk Indonesia, investasi modal fisik yang diukur melalui PMTB terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya PMTB diharapkan dapat meningkatkan produksi nasional mengingat PMTB seperti pembangunan pabrik dan jalan, akan

meningkatkan daya saing dan menjadi input dalam produksi. Dukungan pemerintah dalam hal investasi fisik yang dilakukan pemerintah juga masih relatif rendah, yaitu hanya dikisaran 3% per tahun.

Begitu juga dengan jumlah pekerja yang terlibat dalam perekonomian. Peningkatan yang signifikan pada input tersebut seharusnya mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh semakin tinggi. Namun demikian, rendahnya kualitas pekerja Indonesia terutama terkait produktivitas dan pendidikan yang belum cukup mampu bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara menjadi permasalahan tersendiri. Permasalahan lain yang juga tak kalah penting adalah jumlah lapangan pekerjaan yang peningkatannya tidak signifikan setiap tahunnya sehingga jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam perekonomian juga tidak terlalu banyak. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun PDRB riil perkapita Indonesia, dibutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya besar secara jumlahnya, namun juga baik kualitasnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja pemerintah berpengaruh terhadap PDB riil perkapita Indonesia?
2. Apakah PMTB berpengaruh terhadap PDB riil perkapita Indonesia?
3. Apakah investasi pemerintah berpengaruh terhadap PDB riil perkapita Indonesia?
4. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap PDB riil perkapita Indonesia?
5. Apakah reformasi keuangan negara berpengaruh terhadap PDB riil perkapita Indonesia?
6. Apakah belanja pemerintah, investasi pemerintah, investasi modal fisik, tenaga kerja, dan reformasi keuangan negara secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDB riil perkapita Indonesia?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap PDB riil perkapita Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh investasi modal fisik terhadap PDB riil perkapita Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh investasi pemerintah terhadap PDB riil perkapita Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap PDB riil perkapita Indonesia.
5. Membandingkan PDB riil perkapita Indonesia sebelum dan sesudah reformasi keuangan negara. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh reformasi keuangan negara terhadap PDB riil perkapita Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah, investasi pemerintah, investasi modal fisik, tenaga kerja dan reformasi keuangan negara secara bersama-sama terhadap PDB riil perkapita Indonesia.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis bagi pemerintah dalam meningkatkan PDB riil perkapita, dengan cara meningkatkan kinerja beberapa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap PDB riil perkapita.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara dan mendorong peningkatan PDB riil perkapita.

I.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Secara umum bab ini menggambarkan keseluruhan bab yang akan dibahas dalam penelitian dan kemudian akan dirinci pada bab-bab selanjutnya.

Bab II Tinjauan Literatur

Bab ini berisi tinjauan literatur mengenai teori dan konsep yang memperkuat penelitian. Konsep yang dibahas diantaranya adalah teori pertumbuhan ekonomi, teori belanja pemerintah, dan Reformasi Keuangan Negara. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB riil perkapita. Pada bagian ini juga dijelaskan kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi

Bab ini berisikan penjelasan mengenai data dan metode yang digunakan dalam pengolahan data agar didapatkan interpretasi dan kesimpulan. Dalam bab ini definisi operasional variabel dijabarkan. Selain itu, spesifikasi model yang dipakai juga dijelaskan beserta berbagai uji ekonometrik untuk menghasilkan pendugaan yang paling baik.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan analisis penelitian yang dilakukan dan juga akan dijelaskan bagaimana temuan yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut. Bagian akhir dari bab ini berupa interpretasi dari hasil pengolahan data yang telah digunakan serta pembuktian hipotesis awal yang diajukan.

Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini berisikan dua sub-bab yaitu simpulan dan saran. Simpulan hasil penelitian menjawab tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang telah

dilakukan. Sub bab saran berisi saran-saran yang terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN LITERATUR

II.1. Tinjauan Pustaka

II.1.1 Teori Keynes: Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Pada tahun 1930, John Maynard Keynes, perintis ilmu makroekonomi, menulis buku yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Melalui buku ini, Keynes mengeluarkan gagasan tentang perlunya kebijakan intervensi pemerintah. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa *Great Drepession* yang membuat perekonomian lesu dan pengangguran tinggi. Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menantang gagasan ekonomi neoklasik bahwa pasar bebas, dalam jangka pendek hingga menengah, akan mengisi seluruh lapangan pekerjaan asalkan tuntutan upah pekerja tetap fleksibel. Ia berpendapat bahwa permintaan agregat menentukan tingkat aktivitas ekonomi dan kurangnya permintaan agregat akan memicu pengangguran tingkat tinggi yang bertahan lama.

Prinsip utama dari pemikiran Keynes adalah bahwa intervensi pemerintah dapat menstabilkan ekonomi. Menurut ekonomi Keynesian, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan siklus ekonomi. Keynes mendukung penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi dan depresi ekonomi. Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi adalah dengan melibatkan pemerintah terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran di pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil peranan dalam penyediaan barang yang tidak diminati oleh sektor swasta

Permintaan agregat adalah kekuatan pendorong yang paling penting dalam suatu perekonomian. Keynes berpendapat bahwa permintaan agregat yang tidak memadai dapat menyebabkan pengangguran tinggi yang berkepanjangan. Perekonomian barang dan jasa (Y) adalah jumlah dari empat komponen, yaitu konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), dan ekspor neto (NX). Setiap peningkatan permintaan harus berasal dari salah satu dari empat komponen ini. Tetapi selama resesi, kekuatan yang kuat sering kali mengurangi permintaan seiring dengan pengeluaran yang turun. Misalnya, selama krisis ekonomi ketidakpastian sering mengikis kepercayaan konsumen, menyebabkan mereka mengurangi pengeluaran mereka. Pengurangan pengeluaran konsumen ini menjadikan pengeluaran investasi yang lebih sedikit oleh sektor bisnis, karena perusahaan merespon melemahnya permintaan untuk produk mereka. Disinilah peran pemerintah menjadi penting. Menurut ekonomi Keynesian, intervensi pemerintah diperlukan untuk memoderasi siklus bisnis dalam perekonomian (Jahan et al., 2014).

Sebagaimana disebutkan dalam Jahan et al., (2014), terdapat tiga prinsip utama Keynesian untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bekerja, yaitu:

1. Permintaan agregat dipengaruhi oleh banyak keputusan ekonomi, baik oleh publik/pemerintah maupun sektor swasta. Keputusan sektor swasta terkadang dapat merugikan kondisi makroekonomi, seperti turunnya belanja konsumen selama resesi. Kegagalan pasar ini terkadang memerlukan kebijakan aktif dari pemerintah, seperti paket stimulus fiskal. Oleh karena itu, ekonomi Keynesian mendukung ekonomi campuran dipandu terutama oleh sektor swasta tetapi sebagian juga dioperasikan oleh pemerintah.
2. Harga dan upah bersifat kaku, lambat merepon perubahan *supply* dan *demand* di pasar, mengakibatkan sering terjadi surplus dan *shortage* tenaga kerja.
3. Perubahan permintaan agregat, baik yang diantisipasi ataupun yang tak terduga, memiliki efek jangka pendek terbesar pada output riil dan

kesempatan kerja, bukan pada harga. Keynesian percaya bahwa, karena harga bersifat kaku, fluktuasi dalam komponen pengeluaran baik melalui konsumsi, investasi, atau pengeluaran pemerintah akan menyebabkan output berubah. Jika pengeluaran pemerintah meningkat, misalnya, dan semua komponen pengeluaran lainnya tetap konstan, maka output akan meningkat.

Model kegiatan ekonomi Keynesian juga mencakup efek pengganda yaitu output berubah oleh beberapa kelipatan dari kenaikan atau penurunan pengeluaran yang menyebabkan perubahan. Jika pengganda lebih besar dari satu, maka satu dolar peningkatan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan peningkatan dalam output lebih besar dari satu dolar.

II.1.2 Teori Pertumbuhan Endogen

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi lainnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan output riil per orang.

Todaro (2006) menyatakan “*economic growth is the steady process by which the productive capacity of the economy is increased over time to bring about rising levels of national output and income*”. Teori pertumbuhan endogen menjelaskan pertumbuhan jangka panjang yang berasal dari kegiatan ekonomi yang menciptakan pengetahuan/teknologi baru. Pertumbuhan endogen adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang pada tingkat yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam ekonomi, khususnya kekuatan-kekuatan itu mengatur peluang dan insentif untuk menciptakan pengetahuan teknologi. Model pertumbuhan endogen mengasumsikan *constant return to scale*. Dalam jangka panjang laju

pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan pertumbuhan tingkat output per orang, tergantung pada tingkat pertumbuhan total produktivitas (TFP), yang ditentukan pada tingkat kemajuan teknologi (Bénassy, 2015).

Terdapat beberapa model pertumbuhan ekonomi endogen diantaranya:

1. AK Model

Versi pertama dari teori pertumbuhan endogen adalah teori AK, yang tidak membedakan secara eksplisit antara akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Model ini menyatukan modal fisik dan modal manusia (*human capital*) yang akumulasinya dipelajari oleh teori neoklasik dengan modal intelektual yang terakumulasi ketika inovasi terjadi. Versi awal teori AK dibuat oleh Frankel (1962), yang berpendapat bahwa fungsi produksi agregat dapat menunjukkan produk modal marjinal yang konstan atau bahkan meningkat. Ini karena ketika perusahaan mengakumulasi lebih banyak modal, sebagian dari peningkatan modal itu akan menjadi modal intelektual yang menciptakan kemajuan teknologi, dan kemajuan teknologi ini akan mengimbangi kecenderungan produk marjinal modal untuk berkurang. Dalam kasus khusus di mana produk modal marjinal konstan, output agregat Y sebanding dengan persediaan modal agregat K :

$$Y = AK$$

Menurut teori AK, tingkat pertumbuhan jangka panjang suatu perekonomian bergantung pada tingkat tabungannya. Misalnya, jika bagian tetap s dari output disimpan dan ada tingkat depresiasi d yang tetap, tingkat investasi bersih agregat adalah:

$$\frac{dK}{dt} = sY - \delta K$$

Tingkat pertumbuhan menjadi:

$$g = \frac{1}{Y} \frac{dY}{dt} = \frac{1}{K} \frac{dK}{dt} = sA - \delta$$

Oleh karena itu peningkatan tingkat tabungan s akan menyebabkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi secara permanen.

2. Romer Model

Romer (1986) menghasilkan analisis serupa dengan struktur produksi yang lebih umum, dengan asumsi bahwa penghematan dihasilkan oleh maksimisasi utilitas antarwaktu alih-alih tingkat tabungan tetap. Lucas (1988) juga menghasilkan analisis serupa yang berfokus pada modal manusia (*human capital*) daripada modal fisik; mengikuti Uzawa (1965) ia secara eksplisit berasumsi bahwa modal manusia dan pengetahuan teknologi adalah sama.

3. Arrow Model

KJ Arrow (1962) berpandangan bahwa tingkat koefisien "belajar" adalah fungsi dari investasi kumulatif (yaitu investasi bruto masa lalu). Arrow berusaha mengaitkan fungsi pembelajaran bukan dengan laju pertumbuhan investasi, melainkan dengan tingkat pengetahuan absolut yang telah terakumulasi. Karena Arrow mengklaim bahwa mesin baru ditingkatkan dan versi yang lebih produktif dari yang ada, investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pada modal yang ada, tetapi juga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada semua mesin berikutnya dalam perekonomian.

Dengan konsep bahwa perusahaan menghadapi pengembalian konstan, industri atau ekonomi secara keseluruhan memperhitungkan pengembalian yang meningkat (*increasing return to scale*). Dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas:

$$Y = AK^aL^{1-a},$$

ada skala hasil konstan untuk semua input bersama-sama (karena $a + (1-a) = 1$). Oleh karena itu, seperti dicatat dalam model Solow, mungkin tampak seolah-olah output per modal dan konsumsi per kapita tidak tumbuh kecuali faktor eksogen, A , juga tumbuh. Output dari suatu perusahaan individu tergantung dengan modal, tenaga kerja serta "pertambahan" tenaga kerja oleh A_i . Arrow (1962) berasumsi bahwa A_i , faktor augmentasi teknis, mungkin terlihat khusus untuk perusahaan, tetapi sebenarnya terkait dengan "pengetahuan" total dalam

perekonomian. Pengetahuan dan pengalaman ini, menurut Arrow, adalah umum bagi semua perusahaan: barang publik dan bebas (yaitu konsumsi non-kompetitif).

Arrow berpendapat bahwa pengetahuan muncul dari investasi kumulatif masa lalu dari semua perusahaan. Jadi, Arrow berasumsi bahwa faktor peningkatan teknis terkait dengan modal agregat ekonomi secara keseluruhan dalam proses "belajar sambil melakukan (*learning by doing*)". Fungsi produksi agregat dalam perekonomian adalah:

$$Y = K^{a+z}L^{1-a}$$

Arrow mengasumsikan bahwa $a + z < 1$. Oleh karena itu, jika suatu perekonomian hanya meningkatkan modal (atau hanya tenaga kerja) tidak mengarah pada peningkatan output. Perekonomian dapat memperoleh skala hasil yang meningkat sebagai $a + z + (1-a) = "z" > 0$, tetapi modal dan tenaga kerja keduanya harus bertambah. Namun, dengan menambahkan batasan ini, model asli Arrow menunjukkan skala pengembalian yang tidak meningkat secara agregat jika tingkat pertumbuhan ekonomi stabil.

II.1.3 Teori Pertumbuhan Endogen dengan Belanja Pemerintah

Robert J. Barro (1990) mengembangkan model pertumbuhan endogen dengan memasukkan peran pemerintah. Model pertumbuhan yang dibentuk Barro dimulai dengan model pertumbuhan endogen yang dibangun di atas asumsi pengembalian konstan atas konsep modal yang luas. Rumah tangga dalam perekonomian tertutup berusaha untuk memaksimalkan utilitas keseluruhan seperti berikut:

$$U = \int_0^{\infty} u(c) e^{-\rho t} dt$$

Dimana c adalah konsumsi per orang dan $\rho > 0$ adalah konstan pada tingkat waktu yang dipilih. Populasi sesuai dengan jumlah pekerja dan konsumen adalah konstan. Lalu menggunakan fungsi utilitas:

$$u(c) = \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}$$

Dimana $\sigma > 0$ sehingga utilitas marginal memiliki elastisitas konstan $-\sigma$.
Setiap rumah tangga dan produsen memiliki akses ke fungsi produksi:

$$y = f(k)$$

dimana y adalah output per pekerja dan k adalah modal per pekerja. Setiap orang bekerja dalam jumlah waktu tertentu; artinya tidak ada pilihan waktu luang. Seperti diketahui, rumah tangga memaksimalkan utilitas keseluruhan dalam persamaan (1) menyiratkan bahwa tingkat pertumbuhan konsumsi pada setiap titik waktu diberikan oleh:

$$\frac{c}{c} = \frac{1}{\sigma} \cdot (f' - \rho)$$

Dimana f' adalah produk marginal modal. Barro mengikuti model Robelo yang mengasumsikan pengembalian konstan pada semua jenis modal, sehingga:

$$Y = Ak$$

dimana $A > 0$ adalah produk marginal netto konstan dari modal.

Pengembalian konstan menjadi lebih masuk akal ketika modal dilihat secara luas yang mencakup modal manusia (*human capital*) dan modal non-manusia/modal fisik. Investasi dalam *human capital* mencakup pendidikan, pelatihan dan biaya untuk memiliki dan membesarkan anak. Modal manusia dan modal non-manusia tidak perlu menjadi pengganti yang sempurna (*perfect substitution*) dalam produksi. Oleh karena itu produksi mungkin menunjukkan hasil yang kurang lebih konstan dalam dua jenis modal secara bersama-sama, tetapi hasil yang berkurang pada dua jenis modal secara terpisah.

Barro kemudian memperluas model pertumbuhan ekonomi endogen untuk memasukkan peran belanja pemerintah. Peran pemerintah adalah sebagai input bagi produksi sektor swasta. Ini adalah peran produktif yang menciptakan *linkage* positif antara pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Misalkan g adalah jumlah barang yang disediakan pemerintah untuk rumah tangga dan produsen. Diasumsikan bahwa fungsi produksi adalah

constant return to scale dalam k (*capital*) dan g (barang publik yang disediakan pemerintah), namun secara terpisah k , mengalami *diminishing return*. Barro mengasumsikan fungsi produksi Cobb Douglass sebagai berikut:

$$Y = f(k,g) = Ak^{1-a}g^a$$

Dimana $0 < a < 1$. Pada persamaan tersebut, k merepresentasikan jumlah kapital yang dimiliki produsen yang akan merespon jumlah modal agregat per kapita. Asumsi selanjutnya adalah g dapat diukur sesuai dengan jumlah perkapita dari pembelian barang dan jasa pemerintah. Secara konseptual, diasumsikan pemerintah tidak melakukan produksi dan tidak memiliki modal. Kemudian pemerintah hanya membeli aliran output (termasuk layanan jalan raya, selokan, kapal perang, dll.) dari sektor swasta dan kemudian disediakan pemerintah untuk rumah tangga, sesuai dengan input yang penting untuk produksi swasta dalam persamaan di atas. Selama pemerintah dan swasta memiliki fungsi produksi yang sama, hasilnya akan sama jika pemerintah membeli input swasta dan melakukan produksi sendiri, bukan hanya membeli hasil akhir dari sektor swasta.

II.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah

II.1.4.1 Model Musgrave

Model Musgrave dikembangkan berdasarkan teori pembangunan ekonomi Rostow yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar (*market failure*) dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan lebih

banyak barang dan jasa. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi akan menimbulkan pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan mengurangi dampak dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap PDB semakin besar dan presentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, diperlukan aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

II.1.4.2 Hukum Wagner

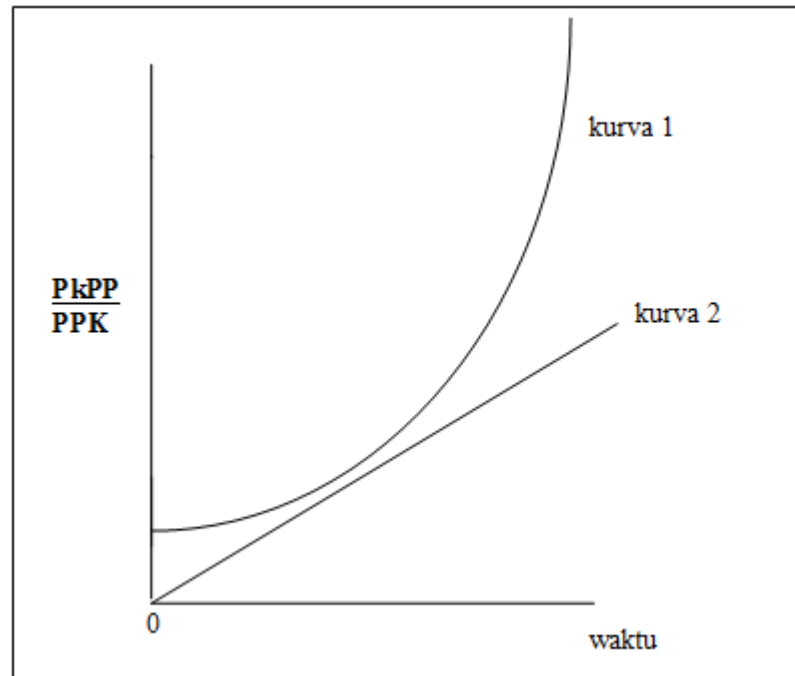
Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan presentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap PDB. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan "*The Law of Expanding State Expenditure*". Hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang). Wagner menjelaskan bahwa peranan pemerintah menjadi semakin besar karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PkPP1}{PPK1} < \frac{PkPP2}{PPK2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn}$$

PkPP : pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : pendapatan per kapita

1,2,...,n : jangka waktu (tahun)



Sumber : Alfirman dan Sutiono (2005)

Gambar 2.1 : Hukum Wagner

II.1.4.3 Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mengasumsikan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan

oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Inti teori Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi (PDB) menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tingkat pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Pengeluaran pemerintah meningkat karena PDB yang mulai meningkat, pengembalian pinjaman dan aktivitas baru setelah perang. Ini yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah dimana kegiatan ekonomi tersebut semula dilaksanakan untuk swasta. Ini disebut efek konsentrasi (*concentration effect*). Adanya ketiga efek tersebut menyebabkan aktivitas pemerintah bertambah. Setelah perang selesai dan keadaan kembali normal maka tingkat pajak akan turun kembali.

II.1.5 Reformasi Keuangan Negara: Paket Undang-Undang keuangan Negara

II.1.8.1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Selama ini pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara masih menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa Hindia Belanda, a lain *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448, *Indische Bedrijenwet* (IBW) Stbl. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 1936 Nomor 445 dan *Reglement voor het administratief* (RAB) Stbl. 1933 Nomor 381. Termasuk juga dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan Negara digunakan *Instructie en verdure bepalingen vor the algemeene Rekenkamer* (IAR) Stbl. 1933 Nomor 320.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 adalah tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi keuangan Negara kita menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang ini, anatar lain:

1. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut:

- Dikuasakan kepada menteri keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan
- Dikuasakan kepada menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian Negara/ lembaga yang dipimpinnya
- Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang a lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang

2. Penyusunan dan penetapan APBN

Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN harus sesuai dengan ketuntasan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan Negara. Maka, hal penting yang ditekankan dalam undang-undang ini penyusunan RAPBN harus berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan deficit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup deficit tersebut dalam undang-undang tentang APBN. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR. Undang-undang ini juga menjabarkan tahapan penting dalam penyusunan APBN.

3. Penyusunan dan penetapan APBD

Seperti halnya APBN, undang-undang ini juga menjabarkan tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. Hubungan Keuangan a Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta pemerintah atau lembaga asing.

5. Hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat.

6. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD

Presiden dan para kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR berupa:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan

II.1.8.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang perlu dikelola dalam suatu pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 harus dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBN dan APBD. Sebelum adanya Undang-undang ini, perbendaharaan Negara masih menggunakan undang-undang perbendaharaan Indonesia buatan Belanda. Undang-undang perbendaharaan Negara Indonesia ini tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan Negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi.

Yang dimaksud dengan perbendaharaan Negara dalam undang –undang ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam undang-undang ini diatur mengenai:

- Ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan Negara
- Kewenangan pejabat perbendaharaan Negara
- Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/daerah
- Pengelolaan uang Negara /daerah
- Pengelolaan utang dan piutang Negara/daerah
- Pengelolaan investasi dan barang milik Negara/daerah
- Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD
- Pengendalian internal pemerintah
- Penyelesaian kerugian Negara/daerah

II.1.8.3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 34, sampai saat ini, BPK masih berpedoman kepada *Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* atau IAR (*Staatsblad* 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1933 Nomor 320).

Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan sebagai berikut:

1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;
2. Lingkup pemeriksaan;
3. Standar pemeriksaan;
4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan;
5. Akses pemeriksa terhadap informasi;
6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern, hasil pemeriksaan dan tindak lanjut;
7. Pengenaan ganti kerugian;
8. Sanksi pidana

II.1.6 Format Baru Belanja Negara

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan tonggak reformasi sektor keuangan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dalam format belanja negara. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa

belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Sedangkan, Pasal 15 ayat (5) menyatakan bahwa APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Dalam penjelasannya, klasifikasi jenis belanja negara tersebut tidak lagi membedakan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Undang- Undang Keuangan Negara menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 kedalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara seperti asas tahunan , asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi, maupun asasa- asas baru yang mendukung pencapaian *good governance* dan *clean government* dalam pengelolaan keuangan Negara antara lain, asas akuntabilitas, yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan oleh badan yang independen.

Sementara itu, dibidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, pemerintah akan menyajikan laporan yang lebih lengkap dan akurat dalam waktu yang relatif singkat. Laporan keuangan tersebut meliputi pelaporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, yang disusun dan disajikan berdasarkan akuntansi pemerintah. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah menyiapkan standar akuntansi pemerintahan dengan mengacu pada *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS)*. Selain itu, untuk menjamin pengelolaan keuangan Negara secara transparan dan bertanggung jawab, berdasarkan UU Pemeriksaan dan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara dan pertanggungjawaban keuangan Negara.

Tabel 2.1 Perbandingan Format Belanja Sesudah UU No. 17 Tahun 2003

FORMAT LAMA	FORMAT BARU
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Klasifikasi Jenis Belanja</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Dual Budgeting</i> – <i>Belanja pusat terdiri dari 6 jenis belanja</i> • <u>Klasifikasi Organisasi</u> <ul style="list-style-type: none"> – terdiri atas 53 Departemen/ Lembaga • <u>Klasifikasi Sektor</u> <ul style="list-style-type: none"> – terdiri atas 20 sektor dan 50 subsektor – Program merupakan rincian dari sektor pada pengeluaran rutin dan pembangunan – Nama-nama program antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan agak berbeda • <u>Dasar Alokasi</u> <ul style="list-style-type: none"> – Alokasi anggaran berdasarkan sektor, subsektor dan program 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Klasifikasi Jenis Belanja</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Unified Budgeting</i> – <i>Belanja pusat terdiri dari 8 jenis belanja</i> • <u>Klasifikasi Organisasi</u> <ul style="list-style-type: none"> – terdiri atas 73 K/L (bagian anggaran) • <u>Klasifikasi Fungsi</u> <ul style="list-style-type: none"> – terdiri atas 11 fungsi dan 79 subfungsi – Program pada masing Kementerian/lembaga digunakan sebagai dasar kompilasi klasifikasi fungsi – Nama-nama program telah disesuaikan dengan <i>unified budget</i> • <u>Dasar Alokasi</u> <ul style="list-style-type: none"> – Alokasi anggaran berdasarkan program kementerian/ lembaga

Sumber : *Modul Dirjen Anggaran Departemen Keuangan*

II.1.7 Klasifikasi berdasarkan Organisasi

Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi disusun berdasarkan susunan kementerian negara/lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran. Klasifikasi ini tidak bersifat permanen dan akan disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintah pusat yang ada. Klasifikasi menurut organisasi ini terinci di dalam Bagian Anggaran, Eselon I dan Satuan Kerja.

II.1.8 Tiga Pilar Penganggaran

UU No. 17 Tahun 2003 juga menyebutkan adanya tiga pilar penganggaran belanja negara, yaitu (1) penganggaran terpadu (*Unified Budget*), (2) penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*), dan (3) penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*).

**Tabel 2.2 Sistem Penganggaran Sebelum dan Sesudah Berlakunya
UU Nomor 17 tahun 2003**

Sebelum	Sesudah
<i>Expenditure control oriented</i>	<i>Focuses on result</i>
<i>Rigid</i>	<i>More flexible</i>
<i>Allocation based is not clear</i>	<i>Evaluability</i>
<i>Ambiguity on distinction between capital and revenue expenditure</i>	<i>Easier decision making</i>
<i>Shorter perspective</i>	<i>Has a long perspective</i>

Sumber: Nota Keuangan dan APBN, 2005

II.1.8.1 Penganggaran Terpadu (*Unified Budget*)

Penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang (*recurrent*) dipertimbangkan secara simultan. Dengan demikian, dualisme perencanaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan di masa

lampau yang menimbulkan peluang duplikasi, penumpukan, dan penyimpanan anggaran tidak akan terjadi lagi.

Perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara terpadu dalam rangka mewujudkan prestasi kerja kementerian/lembaga yang dapat memuaskan masyarakat. Lima komponen pokok pendekatan anggaran terpadu dalam RKA-KL adalah sebagai berikut:

a. Satuan Kerja (Satker)

Penetapan Satker sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk melaksanakan semua kegiatan yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga.

b. Kegiatan

Setiap Satker minimal mempunyai satu kegiatan dalam rangka mewujudkan sebagian sasaran program dari unit organisasi

c. Keluaran

Kegiatan yang dilaksanakan Satker mempunyai keluaran yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan keluaran dari kegiatan lain

d. Jenis Belanja

Jenis Belanja yang ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua kegiatan

e. Dokumen Anggaran

Satu dokumen perencanaan, satu dokumen penganggaran dan satu dokumen pelaksanaan anggaran untuk semua jenis satker dan kegiatan.

Penerapan *unified budget* secara tegas baru dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2005, dengan ditiadakannya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dari struktur dan format APBN. Selanjutnya, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan tersebut dikonversikan, baik ke dalam belanja pegawai, belanja barang, maupun belanja modal dan bantuan sosial. Selanjutnya, eks pengeluaran pembangunan yang dikonversikan ke dalam belanja pegawai dan belanja barang dapat dibedakan antara belanja mengikat dan belanja tidak mengikat. Yang termasuk dengan belanja

mengikat adalah belanja pegawai dan belanja barang yang berkaitan dengan biaya operasional guna mendukung tupoksi dan tidak bisa diganggu gugat, sedangkan yang termasuk ke dalam belanja tidak mengikat adalah belanja-belanja yang berkaitan dengan proyek-proyek, seperti honor proyek, atau belanja barang dalam rangka pelaksanaan proyek.

Tabel 2.3 Perbandingan Format Lama dan Format Baru APBN

Format Lama (s.d 2004)	Format Baru (mulai 2005)
Belanja Pemerintah Pusat:	Belanja Pemerintah Pusat:
1. Pengeluaran Rutin	1. Belanja Pegawai
a. Belanja Pegawai	2. Belanja Barang
b. Belanja Barang	3. Belanja Modal
c. Pembayaran Bunga Utang	4. Pembayaran Bunga Utang
d. Subsidi	5. Subsidi
e. P. Rutin Lainnya	6. Belanja Hibah
2. Pengeluaran Pembangunan	7. Bantuan Sosial
	8. Belanja Lain-Lain

Sumber : Modul Dirjen Anggaran Departemen Keuangan

II.1.8.2 Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budget*)

Penganggaran berbasis kinerja mengutamakan upaya pencapaian *output* (keluaran) dan *outcomes* (hasil) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan. Hal tersebut ditujukan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya indikator kinerja dan pengukuran kinerja untuk tingkat satuan kerja (satker) dan kementerian/lembaga. Lima komponen pokok pendekatan anggaran kinerja dalam RKA-KL adalah sebagai berikut:

a. Satuan Kerja

Satuan Kerja sebagai penanggungjawab pencapaian Keluaran/Output kegiatan/sub kegiatan.

b. Kegiatan

Rangkaian tindakan yang dilaksanakan Satuan Kerja sesuai dengan tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan.

c. Keluaran

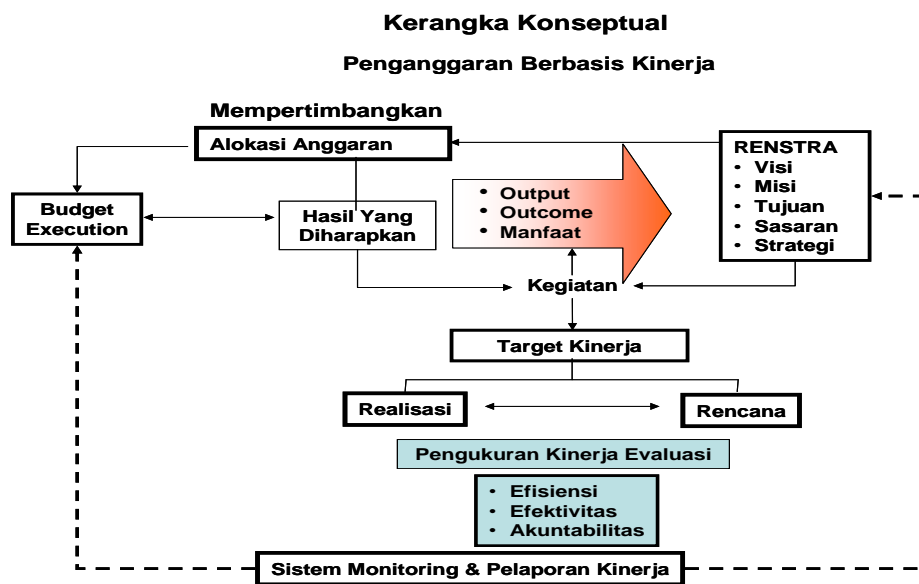
Satuan Kerja mempunyai keluaran yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan.

d. Standar Biaya

Perhitungan anggaran didasarkan pada standar biaya (bersifat umum dan bersifat khusus)

e. Jenis Belanja

Pembebanan anggaran pada jenis belanja yang sesuai



Sumber : Modul Dirjen Anggaran Departemen Keuangan

Gambar 2.2 : Kerangka Konseptual Penganggaran Berbasis Kinerja

Pada dasarnya penganggaran berbasis kinerja merubah fokus pengukuran kinerja dari fokus pengukuran besarnya jumlah alokasi sumber daya bergeser menjadi hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya.

II.1.8.3 Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

KPJM menurut PP No 21 tahun 2004 Pasal 1 poin 5 adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Sedangkan, prakiraan maju menurut PP No. 21 tahun 2004 Pasal 1 poin 6 adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Manfaat KPJM adalah untuk (i) mengembangkan disiplin fiskal, dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), (ii) meningkatkan keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran (antara KPJM, RKP, dan APBN), (iii) mengarahkan alokasi sumberdaya agar lebih rasional dan strategis, (iv) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien, (v) meningkatkan *predictability* dan kesinambungan pembiayaan suatu program/kegiatan, (vi) memudahkan kerja perencanaan kementerian/lembaga pada tahun-tahun berikutnya, dan (vii) mendorong peningkatan kinerja kementerian/lembaga dalam memberikan pelayanan kepada publik.

II.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Pneliti/Tahun	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Robert J. Barro (1990)	<i>Government Spending in A Simple Endogenous Growth Model</i>	Belanja pemerintah yang produktif/GNP; investasi, pajak, dan tingkat tabungan	Memasukkan belanja pemerintah ke dalam model pertumbuhan	Penelitian ini memperluas model pertumbuhan ekonomi endogen untuk memasukkan sektor pemerintah. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat tabungan

				ekonomi endogen	awalnya naik dengan rasio pengeluaran pemerintah produktif terhadap GNP, tetapi ketika mencapai puncaknya dan kemudian menurun. Model juga menunjukkan belanja pemerintah berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi
2.	Robert .J. Barro (1991)	<i>Economic growth in a cross section of countries</i>	Angka partisipasi sekolah, Persentase belanja pemerintah terhadap PDB, investasi pemerintah, investasi swasta stabilitas politik, <i>Purchasing Power Parity</i> dan pertumbuhan PDB per kapita.	Regresi OLS	Persentase konsumsi pemerintah terhadap PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	Pyo (1995)	<i>A Time-Series Test of the Endogenous Growth Model with Human Capital</i>	Modal Fisik perkapita, Modal Manusia perkapita, Modal total perkapita, dan PDB Perkapita.	Regresi OLS	<i>Human capital</i> berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara maju menggunakan <i>human capital</i> sebagai input produktif dan terus mengakumulasi. Hal ini dapat menjelaskan mengapa ada perbedaan antara negara maju dan negara berkembang.
4.	Alqadi & Ismail (2019)	<i>Government Spending and Economic Growth: Contemporary literature review</i>	Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi	Mereviu teori dan penelitian empiris (reviu literatur	Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi secara teori maupun studi empiris masih diperdebatkan. Namun hasil revidu menunjukkan

				kontemporer)	sebagian besar study/penelitian menunjukkan hubungan positif pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memperlihatkan hasil yang berbeda karena: perbedaan negara yang menjadi sampel, tingkat pembangunan tersebut, yang dimasukkan dalam model serta metodologi yang digunakan.
5.	Hansson & Henrekson (1994)	<i>A New Framework for Testing the Effect of Government Spending on Growth and Productivity</i>	Belanja pemerintah, Belanja investasi pemerintah, belanja konsumsi pemerintah, belanja bantuan sosial(transferr), <i>Total Factor Productivity</i> dan pertumbuhan ekonomi	Regresi OLS	Belanja bantuan sosial (transfer), belanja konsumsi pemerintah, dan belanja pemerintah total berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan dan <i>Total Factor Productivity</i> . Namun belanja di bidang pendidikan (sebagai investasi pemerintah) berpengaruh positif terhadap <i>total factor productivity</i> .
6.	Barrios & Schaechter (2018)	<i>The Quality of Public Finances and Economic Growth</i>	Kualitas Anggaran/Keuangan Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi	Analisis kualitatif (review teori dan penelitian empiris) menggunakan <i>growth-accounting approach</i>	Kinerja yang baik belum cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Diperlukan kinerja yang baik di berbagai sektor untuk mencapai hal itu. Belanja pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika belanja tersebut dapat mengatasi kegagalan pasar dan menyediakan barang publik. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemangku kebijakan

					harus berfokus pada efisiensi belanja pemerintah.
7.	Nyasha & Odhiambo (2019)	<i>The Impact of Public Expenditure on Economic Growth: A Review of International Literature</i>	Pengeluaran Pemerintah dan pertumbuhan ekonomi	Reviu literatur	Kajian teoritis dan empiris menunjukkan pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan berbeda-beda, ada yang positif, negatif, maupun netral.
8.	Devarajan et al. (1996)	<i>The Composition of Public Expenditure and Economic Growth</i>	Pertumbuhan ekonomi, Porsi Belanja pemerintah terhadap PDB, suku bunga	<i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	Hasil menunjukkan bahwa untuk 40 negara berkembang yang menjadi sampel, belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, belanja modal pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan perkapita. Hal ini mengindikasikan belanja produktif jika digunakan berlebihan justru akan menjadi tidak produktif.
9.	K.C et al. (2018)	<i>The Effect of Public Expenditure on the Economic Growth in Nigeria (1980-2013)</i>	Pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah untuk administrasi, ekonomi, pelayanan umum, transfer, dan belanja modal.	Regresi berganda	Dalam jangka pendek tidak ada hubungan yang signifikan antara pengeluaran pemerintah dan PDB Riil (pertumbuhan ekonomi) di Nigeria pada periode 1980-2013. Hal ini kemungkinan disebabkan penyalahgunaan dana atau belanja modal non <i>re-investment</i> di negara tersebut. Dalam jangka panjang mungkin saja belanja pemerintah mempengaruhi/menciptakan pertumbuhan ekonomi.
10.	D. J. Mitchell (2005)	<i>The Impact of Government Spending on</i>	Belanja pemerintah dan	Analisis kualitatif	Analisis dan reviu terhadap beberapa penelitian menunjukkan hubungan negatif Antara

		<i>Economic Growth</i>	pertumbuhan ekonomi		belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi
11.	Bleaney et al. (2001)	<i>Testing the Endogenous Growth Model: Public Expenditure, Taxation. And Growth Over The Long Run</i>	Belanja pemerintah, pajak, rasio investasi, surplus anggaran dan pertumbuhan ekonomi	Regresi data panel untuk menguji teori pertumbuhan endogen	Ketika belanja pemerintah dibiayai oleh campuran pengeluaran non-produktif dan perpajakan non-distorsi, pengeluaran produktif meningkatkan tingkat pertumbuhan dan pajak distorsi menguranginya. Surplus anggaran juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
12.	Mazurova & Kollar (2015)	<i>The Importance of Government Spending in Context of Fiscal Policy</i>	Belanja pemerintah, PDB, MPC dan angka pengganda pengeluaran (<i>spending multiplier</i>)	Analisis kualitatif (review teori dan penelitian empiris)	Dengan menggunakan angka pengganda pengeluaran terbukti bahwa belanja pemerintah menstimulasi pertumbuhan ekonomi bahkan di saat terjadi krisis, namun pengaruh tersebut lebih rendah di saat krisis.
13.	Lee et al.(2019)	<i>Study of the Relationship between Government Expenditures and Economic Growth for China and Korea</i>	Belanja pemerintah di bidang kebudayaan, ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, pelayanan umum, kesehatan, dan jaminan sosial serta pertumbuhan ekonomi	<i>Quintile Regression Model</i>	Campur tangan pemerintah di Korea relative kecil sehingga elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap belanja pemerintah cukup tinggi. Untuk China, karena pemerintahnya sangat aktif mengintervensi perekonomian, belanja pemerintah tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
14.	Dao (2012)	<i>Government Expenditure and Growth in Developing Countries</i>	Belanja pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, jumlah penduduk, PMTB dan pertumbuhan ekonomi	<i>Simultaneous Equation Model (SEM)</i>	Penelitian terhadap 28 negara berkembang menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB perkapita bergantung pada pertumbuhan belanja per kapita di bidang kesehatan, belanja pendidikan, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan

					belanja kesehatan serta PMTB.
15.	Hasnul (2016)	<i>The Effect of Government Expenditure on Economic Growth: The case of Malaysia</i>	PDB riil, PMTB, Angkatan KerjaEkspor Impor, dan belanja pemerintah.	Regresi data time series: OLS	Terdapat hubungan negatif antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia pada 1970-2014. Hanya belanja bidang perumahan dan belanja pembangunan yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang rendah.
16.	Sudarsono (2010)	<i>The Relationship Between Economic Growth and Government Spending: A Case Study of OIC Countries</i>	PDB riil perkapita dan belanja pemerintah	<i>Granger Causality Test</i>	Pengeluaran pemerintah menyebabkan pertumbuhan ekonomi terjadi di Negara Iran, Nigeria, dan Tunisia, sesuai dengan teori Keynesian. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah terjadi di Negara Aljazair, Burkina, Benin, Indonesia, Libya, Malaysia, maroko dan Saudi sebagaimana hukum Wagner
17.	Alexiao (2009)	<i>Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from South Eastern Europe (SEE)</i>	Belanja modal, investasi swasta, keterbukaan perdagangan, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.	Regresi data panel	Belanja modal, bantuan pembangunan, investasi swasta, dan keterbukaan perdagangan berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh.
18.	Mudaki & Masaviru (2012)	<i>Does The Composition of Public Expenditure Matter to Economic Growth for Kenya?</i>	PDB riil, belanja di bidang pertahanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi, pertanian dan manufaktur	Regresi OLS	Belanja di bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun belanja di bidang pertanian berdampak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kenya. Belanja pemerintah lainnya tidak berpengaruh terhadap

					pertumbuhan ekonomi Kenya.
19.	Siefu et al. (2018)	<i>Government Spending and Economic Growth in Cameron</i>	PDB, investasi pemerintah dan investasi swasta	<i>Vector Auto Regressive (VAR)</i> model	Hasil menunjukkan bahwa Lagged GDP dan investasi pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kamerun, sedangkan investasi swasta justru berpengaruh negatif.
20.	Cesarina Maulid et al (2021)	<i>The Effect of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia</i>	Belanja pemerintah pusat (terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga, subsidi dan bantuan social) dan PDB	Regresi OLS	Belanja pegawai dan belanja barang berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal berpengaruh signifikan namun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun komponen belanja pemerintah lainnya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
21.	Santika & Qibthiyyah (2020)	<i>Government Size dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia</i>	Belanja pemerintah di daerah (belanja K/L dan belanja APBD), PDRB per Kapita, PMTB, Rata-rata Lama Sekolah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	<i>Fixed Effect Model</i>	Hasil menunjukkan bahwa <i>government size</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Sementara <i>government size</i> kuadrat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh <i>government size</i> terhadap pertumbuhan ekonomi berbentuk kurva U terbalik sehingga terdapat <i>Threshold government size</i> .
22.	Pula & Elshani (2018)	<i>Role of Public Expenditure in Economic Growth: Econometric Evidence from Kosovo</i>	Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, <i>Foreign Direct Investment</i> , Penerimaan	Regresi <i>data time series</i>	Hasil uji empiris menunjukkan pengeluaran pemerintah dan ekspor berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. FDI dan Penerimaan pajak tidak

			Pajak, dan Ekspor		berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kosovo.
23.	Nurudeen & Usman (2010)	<i>Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregated Analysis</i>	Pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, inflasi dan <i>Fiscal Balance</i>	Regresi data <i>time series</i>	Hasil uji empiris menunjukkan belanja modal dan belanja rutin berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria karena kesalahan pengelolaan dan penyalahgunaan dana.
24.	Ghali (1997)	<i>Government Spending and Economic Growth in Saudi Arabia.</i>	PDB riil perkapita dan persentase belanja pemerintah terhadap PDB	<i>Vector Auto Regressive (VAR) dan Granger Causality</i>	Analisis empiris tidak menemukan bukti yang konsisten bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan output per kapita Arab Saudi.
25.	Safari & Fikri (2016)	Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, dan Pengeluaran pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Ekspor, PMTB, pengeluaran pemerintah, variabel dummy (krisis)	Regresi data <i>time series</i> menggunakan <i>Error Correction Model (ECM)</i>	Ekspor dan PMTB berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek serta terjadinya krisis tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
26.	Ambya (2020)	<i>How Government Spending on Public Sektor Affect The Economic Growth?</i>	Pertumbuhan ekonomi, belanja di bidang pendidikan, belanja di bidang kesehatan, belanja infrastruktur dan jumlah tenaga kerja	Regresi data panel	Hasil penelitian membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam pendidikan per kapita riil, kesehatan riil (<i>lag-1</i>) per kapita, dan infrastruktur riil per kapita, dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten tidak berbeda dengan kota, demikian juga di sektor basis sebagian besar tidak

					berbeda kecuali sektor pertambangan dan penggalian.
27.	Bachtiar et al., (2015)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat, Pembayaran Bunga Utang, dan Subsidi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2013	Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan belanja barang, pertumbuhan belanja pegawai, pertumbuhan belanja modal, pertumbuhan pembayaran bunga utang, dan pertumbuhan subsidi	Regresi linear berganda (OLS)	Pertumbuhan belanja modal, pembayaran bunga utang dan subsidi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja barang dan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
28.	Ahdini & Mandala (2020)	<i>Inflation, Government Expenditure, and Economic Growth in Indonesia</i>	Belanja rutin, belanja pembangunan, inflasi, total belanja pemerintah, investasi, Jumlah Tenaga Kerja, dan pertumbuhan ekonomi	<i>Eagle Granger Cointegration Test dan Error Correction Model (ECM)</i>	Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah negatif, sementara itu hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi adalah positif. Belanja rutin tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
29.	Widiastuti & Saleh (2019)	Dampak Pengeluaran pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi kasus Panel data	Pertumbuhan ekonomi, rasio total belanja pemerintah terhadap PDB, rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB, rasio PMTB terhadap PDB, dan <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI)	Regresi data panel	Penelitian dengan sampel 96 negara, sampel Indonesia, dan sampel antar Provinsi di Indonesia menghasilkan kesimpulan yang bervariasi terkait dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka disimpulkan bahwa hubungan Antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi bergantung pada banyak factor.
31.	Lilian (2020)	<i>Impacts of Higher Education Enrollment on</i>	<i>PDB, Enrollment Rate pada jenjang</i>	<i>Co-integration and Ordinary</i>	Pengaruh pendidikan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi negatif dan tidak

		<i>Economic Growth in Uganda</i>	<i>perguruan tinggi</i>	<i>Least Square dan Panel Fully Modified Least Square (FMOLS)</i>	signifikan dalam jangka panjang.
33.	Wahyuni (2015)	<i>The Role of Government in Economic Growth: Evidence From Asia and Pacific Countries</i>	PDB Per kapita, belanja pemerintah, <i>Secondary School enrollment</i> , penerimaan pajak, dan inflasi	<i>Unbalance d Panel Method</i>	Belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara Asia Pasifik. Selain itu, pendidikan menengah juga berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi saat ini.
34.	Kharisma & Pratikto (2019)	Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : <i>Analisis Panel Seemingly Unrelated Regression</i>	Belanja pemerintah sektor pertahanan, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi dan komunikasi, dan <i>manufacturing PDRB Per kapita</i> , investasi, tingkat harapan hidup penerimaan pajak dan pengeluaran rutin.	<i>Metode panel seemingly unrelated regression (SURE)</i>	Hampir seluruh sektor pengeluaran pemerintah berkorelasi negatif dan tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Hanya pengeluaran sektor keamanan dan ketertiban yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
35.	Suryanto & Kurniati (2019)	Tinjauan Perubahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia	Perubahan sistem penganggaran	<i>Pendekatan kualitatif deskriptif</i>	Implementasi penganggaran berbasis kinerja masih jauh dari ekspektasi. Pelaksanaan di lapangan belum optimal dan masih sebatas memenuhi ketentuan.
36.	Ramayandi (2003)	<i>Economic Growth And Government Size in Indonesia:</i>	Konsumsi pemerintah, investasi pemerintah,	<i>Error Correction Model (ECM)</i>	Pengaruh belanja pemerintah (<i>Government Size</i>) terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung

		<i>Some Lessons For The Local Authority</i>	tenaga kerja, PDB		pada jenis belanja pemerintah.
37.	Safari & Fikri (2016)	<i>Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia</i>	PDB, ekspor, PMTB, dan pengeluaran pemerintah.	<i>Error Correction Model (ECM)</i>	Ekspor, pembentukan modal, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap PDB baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

II.3. Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan negara. Perekonomian yang tumbuh berarti output yang dihasilkan suatu negara makin tinggi dan juga dapat berarti pendapatan nasional meningkat. Pertumbuhan ekonomi pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Keynes menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah untuk menstimulus perekonomian dan meningkatkan permintaan agregat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan belanja pemerintah sebagai instrumen fiskal yang memacu perekonomian. Dalam teori pertumbuhan ekonomi endogen yang dikembangkan Arrow, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor modal, tenaga kerja, dan pengetahuan. Robert J. Barro (1990) menyatakan pertumbuhan endogen mengasumsikan pengembalian konstan (*constant return to scale*) ke dalam konsep modal (*capital*) yang luas. Modal tidak hanya berupa modal fisik, namun juga modal manusia (*human capital*). Lalu model pertumbuhan endogen tersebut diperluas untuk memasukkan peran pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berbagai penelitian juga telah membuktikan pengaruh belanja pemerintah yang signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mazurova dan Kollar (2005) menemukan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk disaat terjadi krisis.

Di Indonesia, realisasi belanja pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 1973-2019 belanja pemerintah telah meningkat dari Rp1.07 triliun menjadi lebih dari Rp1.900 triliun di tahun 2019. Belanja pemerintah yang sedemikian besar diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan karena belanja pemerintah juga merupakan salah satu input dalam proses produksi (Robert J. Barro, 1990). Selain itu, sebagai instrumen kebijakan fiskal, anggaran juga ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu komponen Produk Domestik Bruto, belanja pemerintah berperan dalam meningkatkan output perekonomian (pertumbuhan ekonomi). Pemerintah yang mengalokasikan peningkatan pengeluaran/belanja untuk mengurangi distorsi pasar, menegakkan hak milik, menyediakan layanan infrastruktur, dan memastikan pasar keuangan yang lebih baik akan menghasilkan efisiensi yang diterjemahkan ke dalam pertumbuhan ekonomi (Robert J. Barro, 1996). Belanja pemerintah untuk subsidi, bidang pendidikan, serta riset dan teknologi juga akan meningkatkan *human capital* yang dapat diakumulasikan untuk membentuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

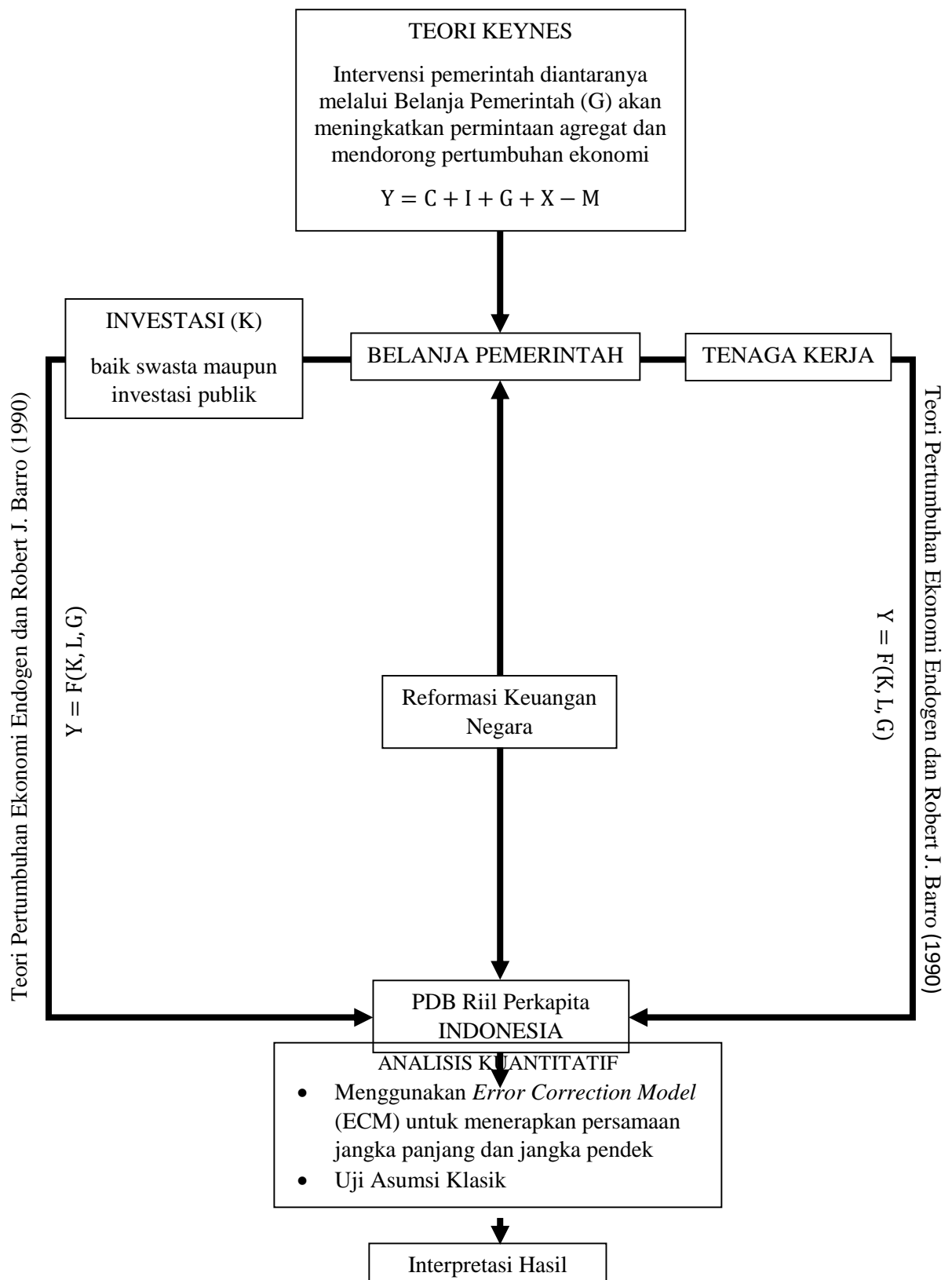
Untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan belanja dalam APBN, pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan reformasi keuangan negara yang ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara. Terbitnya paket Undang-Undang tersebut menandai babak baru dalam pengelolaan anggaran pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan menggunakan kaidah pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku umum dan universal diharapkan anggaran pemerintah dapat dikelola lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Reformasi keuangan negara yang telah diterapkan pada APBN sejak tahun 2005 merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk memperbaiki

pengelolaan keuangan negara, termasuk belanja pemerintah. Diharapkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan sehingga semakin berdampak pada perekonomian negara. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta pemerataan pendapatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Reformasi keuangan negara juga merupakan bentuk perbaikan institusi/kelembagaan. Kualitas kelembagaan yang baik menjadi faktor penting untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini seperti telah dibuktikan secara empiris oleh Vedia-Jerez & Chasco (2016).

Teori pertumbuhan ekonomi menyatakan faktor *capital*/modal sangat penting perannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Modal yang digunakan tidak hanya berupa modal fisik (investasi), namun juga modal manusia (*human capital*). Investasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Peran pemerintah untuk meningkatkan investasi modal fisik juga dapat berupa pengeluaran pemerintah untuk investasi publik, diantaranya berupa pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi input dan mendukung peningkatan produksi sektor swasta. Oleh karenanya peran tenaga kerja (*labor*) juga penting karena selain sebagai input dalam proses produksi, pekerja juga akan menyerap pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Penelitian ini menggunakan metode regresi *Error Correction Model* untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah, investasi pemerintah, investasi (modal fisik), dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek dan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah reformasi keuangan negara dilaksanakan. Setelah melakukan uji asumsi klasik dan memastikan model sudah memenuhi asumsi *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) selanjutnya dilakukan interpretasi hasilnya.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

II.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan literatur dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Diduga belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB riil perkapita Indonesia.
2. Diduga investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB riil perkapita Indonesia.
3. Diduga PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB riil perkapita di Indonesia.
4. Diduga tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB riil perkapita Indonesia.
5. Diduga reformasi keuangan negara yang dimulai sejak berlakunya Paket Undang-Undang Keuangan Negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB riil perkapita di Indonesia. Terdapat perbedaan capaian PDB riil perkapita pada periode sebelum dan sesudah reformasi keuangan negara.

III. METODOLOGI

III.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif berupa data *time series* (runtut waktu) dengan menggunakan data sekunder yang tersedia dari berbagai sumber. Adapun sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Variabel dan Sumber Data

No.	Variabel	Satuan Pengukuran	Sumber Data
1.	Produk Domestik Bruto Riil Perkapita (GDP)	Rupiah	<i>World Development Indicators, World Bank</i>
2.	Belanja Pemerintah Riil Perkapita (Govex)	Rupiah	<i>World Development Indicators World Bank</i>
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto Riil Perkapita (PMTB)	Rupiah	<i>World Development Indicators World Bank</i>
4.	Investasi Pemerintah Riil Perkapita (PUB)	Dolar	<i>IMF Investment and Capital Stock Dataset</i>
5.	Tenaga kerja (EMP)	Orang	<i>Penn World Table 2021</i>
6.	<i>Dummy</i>	0=Sebelum Reformasi Keuangan Negara 1=Setelah Reformasi Keuangan Negara	Kementerian Keuangan

III.2. Definisi Operasional Variabel

III.2.1 Produk Domestik Bruto Riil Perkapita (GDP)

Data Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita atas dasar harga konstan/PDB riil perkapita yang digunakan bersumber dari *World Bank*. PDB riil perkapita adalah Produk Domestik Bruto riil dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDB atas dasar harga pembeli adalah jumlah nilai tambah bruto oleh semua produsen residen dalam perekonomian ditambah pajak produk dan dikurangi subsidi yang tidak termasuk dalam nilai produk. Ini dihitung tanpa membuat pengurangan untuk penyusutan aset yang dibuat-buat atau untuk penipisan dan degradasi sumber daya alam. Data dalam satuan Rupiah (harga konstan).

Penelitian ini menggunakan variabel Produk Domestik Bruto riil perkapita sebagaimana telah digunakan oleh Vedia-Jerez & Chasco (2016), Pyo (1995) dan Kharisma & Pratikto (2019).

III.2.2 Belanja Pemerintah Riil Perkapita (Govex)

Pada penelitian ini, belanja pemerintah yang digunakan adalah data pengeluaran konsumsi akhir pemerintah dari World Bank. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah umum (sebelumnya disebut konsumsi pemerintah umum) mencakup semua pengeluaran pemerintah saat ini untuk pembelian barang dan jasa (termasuk kompensasi pegawai). Komponen ini juga mencakup sebagian besar pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan nasional, tetapi tidak termasuk pengeluaran militer pemerintah yang merupakan bagian dari pembentukan modal pemerintah. Data dalam satuan mata uang Rupiah (harga konstan). Kemudian untuk mendapatkan belanja perkapita, data tersebut dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut yang bersumber dari data populasi (jumlah penduduk) di *Penn World Table 2021*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barro (1990) juga menggunakan variabel ini.

III.2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto Riil Perkapita (PMTB)

Variabel PMTB digunakan untuk memproksi investasi modal fisik (*physical capital*) dalam penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari World Bank. Pembentukan modal tetap bruto (sebelumnya disebut penanaman modal tetap domestik bruto) meliputi perbaikan lahan (pagar, parit, saluran air, dan sebagainya); pembelian pabrik, mesin, dan peralatan; dan pembangunan jalan raya, rel kereta api, dan sejenisnya, termasuk sekolah, kantor, rumah sakit, tempat tinggal pribadi, dan bangunan komersial dan industri. Selain itu akuisisi bersih barang berharga juga dianggap sebagai pembentukan modal. Data dalam satuan Rupiah (harga konstan). Kemudian untuk mendapatkan PMTB perkapita, data tersebut dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut yang bersumber dari data populasi (jumlah penduduk) di *Penn World Table 2021*.

Variabel PMTB riil perkapita telah digunakan oleh Pyo (1995) dan Amri & Aimon (2017) pada penelitian terdahulu untuk menganalisis pengaruh PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi.

III.2.4 Investasi Pemerintah Riil Perkapita (PUB)

Data investasi pemerintah riil perkapita (PUB) menggunakan data investasi pemerintah umum (PMTB yang dilakukan oleh pemerintah), dalam dolar harga konstan dengan tahun dasar 2017. Data tersebut diperoleh dari IMF *Investment and Capital Stock Dataset 2021*. Investasi publik/investasi pemerintah menggunakan PMTB dari pemerintah umum (pemerintah pusat dan daerah). Kemudian untuk mendapatkan investasi pemerintah perkapita, data tersebut dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut yang bersumber dari data populasi (jumlah penduduk) di *Penn World Table 2021*. Pemilihan variabel ini sesuai dengan yang digunakan Robert J. Barro (1991), Epaphra & Massawe (2016) dan Ramayandi (2003) pada studi empiris dalam membuktikan pengaruh belanja pemerintah terhadap

pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya, Robert J. Barro (1991) membagi investasi menjadi investasi swasta dan investasi pemerintah (*public investment*).

III.2.5 Tenaga Kerja (EMP)

Salah satu input yang digunakan dalam produksi adalah *labor*. Pada penelitian ini *labor* diproksi dengan jumlah orang yang bekerja di Indonesia. Data yang digunakan bersumber dari *Penn World Table* 2021 dengan satuan dinyatakan dalam orang. Orang yang bekerja mencakup semua orang yang berusia 15 tahun ke atas, yang melakukan pekerjaan selama minggu acuan, bahkan hanya untuk satu jam seminggu, atau tidak sedang bekerja tetapi memiliki pekerjaan atau bisnis di mana mereka tidak ada untuk sementara waktu.

Beberapa peneliti telah menggunakan jumlah orang yang bekerja sebagai proksi *labor* diantaranya Ambya (2020), Ahdini & Mandala (2020), Pyo (1995) dan Salihin (2020).

III.2.6 Dummy

Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah Reformasi Keuangan Negara. Pemilihan variabel *dummy* ini didasari konsep bahwa reformasi keuangan negara yang dilakukan pemerintah juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Reformasi Keuangan Negara akan diproksi dengan diberlakukannya Paket UU Keuangan Negara yaitu UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, dan UU No.15 tahun 2004, dimana:

- a. angka 0 menunjukkan tahun sebelum diberlakukannya paket UU Keuangan Negara pada APBN (sampai dengan tahun 2004), dan
- b. angka 1 menunjukkan tahun setelah diberlakukannya paket UU Keuangan Negara pada APBN (tahun 2005-2019).

Tahun 2005 dipilih untuk menjadi awal tahun Reformasi Keuangan Negara karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami perubahan menjadi penganggaran terpadu/*unified budget* yang secara tegas baru dilaksanakan pada tahun 2005 yang ditunjukkan dengan perubahan pengelompokan transaksi pemerintah/format baru belanja APBN. Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, dilakukan perubahan klasifikasi anggaran sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Penganggaran secara terpadu atau *unified budget*, adalah penerapan anggaran yang tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan pembangunan.

Penerapan penganggaran secara terpadu maka memuat semua kegiatan instansi pemerintahan dalam APBN yang disusun secara terpadu. Penerapan sistem ini merupakan tahap yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah. Dengan berlakunya *unified budget*, dualisme perencanaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan di masa lampau yang menimbulkan peluang duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran tidak terjadi lagi. Klasifikasi belanja Negara tidak lagi berdasarkan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

III.3. Sampel

Keterbatasan waktu dan ketersediaan data menjadikan penelitian ini dilakukan menggunakan sampel. Sampel yang digunakan untuk data *time series* ini adalah tahun 1985 sampai dengan 2019. Penelitian ini tidak memasukkan data tahun 1998 dan 1999 karena pada periode tersebut

terjadi krisis ekonomi yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif dan berbeda dengan tren pertumbuhan ekonomi pada tahun lainnya. Data tahun 1998 dan 1999 menjadi *outlier* saat dimasukkan dalam penelitian.

III.4. Spesifikasi Model

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode sebelum dan sesudah reformasi keuangan negara. Variabel dependen penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (*Growth*). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa variabel independen yaitu belanja pemerintah, investasi pemerintah, investasi modal fisik (PMTB), dan tenaga kerja. Kemudian untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah reformasi keuangan negara, digunakan variabel *dummy*.

Penelitian ini mengadopsi model pertumbuhan endogen dari Arrow dan Robert J. Barro (1990). Model endogen (Barro, 1990) memasukkan peran belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian ini tidak memasukkan *human capital* sebagai salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal (fisik) dan tenaga kerja serta memasukkan peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Model pertumbuhan ekonomi Endogen dari Arrow menyatakan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal dan tenaga kerja. Dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas:

$$Y = AK^aL^{1-a} \quad (1)$$

ada skala hasil konstan untuk semua input bersama-sama (karena $a + (1-a) = 1$).

Output dari suatu perusahaan individu tergantung dengan modal, tenaga kerja serta "pertambahan" tenaga kerja oleh A. Arrow (1962) berasumsi bahwa A, faktor augmentasi teknis, mungkin terlihat khusus untuk

perusahaan, tetapi sebenarnya terkait dengan "pengetahuan" total dalam perekonomian. Arrow berpendapat bahwa pengetahuan muncul dari investasi kumulatif masa lalu dari semua perusahaan. Jadi, Arrow berasumsi bahwa faktor peningkatan teknis terkait dengan modal agregat ekonomi secara keseluruhan dalam proses "belajar sambil melakukan (*learning by doing*)". Jadi,

$$Y = f(K, L) \quad (2)$$

Fungsi produksi agregat dalam perekonomian adalah:

$$Y = K^a + zL^{1-a} \quad (3)$$

Arrow mengasumsikan bahwa $a + z < 1$. Oleh karena itu, jika suatu perekonomian hanya meningkatkan modal (atau hanya tenaga kerja) tidak mengarah pada peningkatan output. Perekonomian dapat memperoleh skala hasil yang meningkat sebagai $a + z + (1-a)z > 0$, tetapi modal dan tenaga kerja keduanya harus bertambah.

Kemudian untuk menjawab masalah penelitian terkait dengan pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, model dikembangkan dengan menggunakan model pertumbuhan endogen dari Barro (1990). Model pertumbuhan yang dibentuk Barro dimulai dengan model pertumbuhan endogen yang dibangun di atas asumsi pengembalian *constant* atas konsep modal yang luas. Modal dalam model Barro mencakup modal fisik dan *human capital*. Modal fisik juga dibagi menjadi modal swasta dan modal pemerintah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh A yang juga merupakan *total factor productivity* (TFP). Barro kemudian memperluas model pertumbuhan ekonomi endogen untuk memasukkan peran belanja pemerintah. Peran pemerintah adalah sebagai input bagi produksi sektor swasta. Ini adalah peran produktif yang menciptakan *linkage* positif antara pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

$$Y = f(K, G) \quad (4)$$

Selain menggunakan total belanja pemerintah, Barro juga membagi belanja pemerintah menjadi belanja produktif dan non produktif serta menggunakan variabel investasi swasta dan investasi pemerintah. Model

pertumbuhan yang dikembangkan Barro juga menambahkan faktor selain *human capital*, yaitu *labor*. Namun variabel *labor* yang digunakan adalah pertumbuhan populasi (jumlah penduduk). Dengan menggabungkan persamaan (2) dan (4), maka pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, dan belanja pemerintah:

$$Y = f(K, L, G) \quad (5)$$

Berdasarkan pada tujuan penelitian, model penelitian dari Arrow dan Barro kemudian dimodifikasi sebagai berikut:

$$GDP = \alpha + \beta_1 Govex + \beta_2 PMTB + \beta_3 PUB + \beta_4 EMP + \beta_5 Dummy + \varepsilon$$

Dimana:

- GDP* : Produk Domestik Bruto Riil Perkapita (Rupiah)
- α : Konstanta
- Govex* : Belanja pemerintah riil perkapita (Rupiah)
- PMTB* : Pembentukan Modal Tetap Bruto Riil Perkapita (Rupiah)
- EMP* : Jumlah orang yang bekerja (orang)
- PUB* : Investasi Pemerintah Riil Perkapita (Dolar)
- Dummy* : Reformasi Keuangan Negara, dimana 0 adalah tahun sebelum Reformasi Keuangan Negara (1985-2004), dan 1 adalah tahun setelah Reformasi Keuangan Negara (2005-2019)
- ε : *Error term*

III.5. Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah analisis data *time series* menggunakan regresi dengan metode koreksi kesalahan (*Error Correction Model*). Adapun aplikasi yang digunakan untuk membantu mengolah data adalah Microsoft Excel 2013 dan E-views 10.

III.5.1 Analisis Data dengan *Error Correction Model* (ECM)

Persoalan krusial dalam analisis deret waktu adalah seringkali data tidak stasioner. Data yang tidak stasioner akan bersifat heteroskedastis dan memiliki autokorelasi. Selain itu, pada data yang tidak stasioner sering ditemui dua atau lebih variabel yang bergerak dengan arah yang sama atau berlawanan, tetapi pergerakan tersebut terjadi secara kebetulan dan tidak berdasarkan teori atau logika (Juanda & Junaidi, 2012).

Data *time series* seringkali tidak stasioner sehingga menghasilkan hasil regresi yang meragukan atau disebut regresi lancung (*spurious regression*). Regresi lancung merupakan kondisi dimana hasil regresi diperoleh nilai koefisien atau *slope* regresi yang signifikan dan nilai koefisien determinasi (R^2) yang tinggi akan tetapi variabel di dalam model tidak saling berhubungan. Ada kemungkinan hasil regresi tersebut merupakan data *time series* yang tidak stasioner, sehingga perlu menggunakan perhitungan tersendiri, satu diantaranya adalah menggunakan model koreksi kesalahan atau *Error Correction Model* (Aspian Nur, 2019).

Dengan model ECM, masalah regresi lancung (*spurious regression*) dapat diatasi melalui penggunaan variabel perbedaan (*difference*) yang tepat di dalam model. ECM juga tidak menghilangkan informasi jangka panjang akibat penggunaan data perbedaan (*difference*) saja, karena ECM juga memasukkan variabel level. Model ECM yang valid mengindikasikan adanya kointegrasi (hubungan jangka panjang) antar variabel, spesifikasi modelnya benar, teori ekonominya benar, dan terdapat hubungan kausalitas, paling tidak hubungan satu arah di mana variabel independen mempengaruhi variabel dependennya secara signifikan (Astuti, 2001).

Regresi dengan ECM harus memenuhi beberapa asumsi dan tahapan berikut:

1. Uji stasioneritas/uji akar unit

Uji stasioneritas digunakan untuk melihat apakah data *time series* yang digunakan stasioner atau tidak. Suatu data dikatakan stasioner jika rata-rata dan variasinya konstan sepanjang waktu. Data yang stasioner penting untuk menghindari regresi lancung. Terdapat beberapa uji yang dapat dilakukan untuk mengetahui stasioneritas data dan penelitian ini menggunakan uji akar unit (*unit root test*) yang dikembangkan oleh Dickey-Fuller.

Kriteria pengujian akar unit adalah:

H_0 : terdapat *unit root* atau data *time series* tidak stasioner.

Jika Nilai ADF statistik $< \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak atau data stasioner.

2. Uji derajat integrasi

Berbagai studi atas data *time series* seringkali menghasilkan data yang tidak stasioner pada level. Bila data yang diamati pada uji akar unit ternyata tidak stasioner, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji derajat integrasi. Uji ini untuk mengetahui pada derajat ke berapa data akan stasioner. Jika data *time series* mengandung masalah *unit root*, *difference* pertama (*first difference*) data tersebut stasioner (Damodar N Gujarati & Dawn C. Porter, 2009). Seperti dijelaskan sebelumnya, data *time series* yang stasioner penting untuk menghindari regresi lancung. Perlu untuk diperhatikan stasioneritas yang ditunjukkan oleh variabel-variabel dalam format turunan pertama atau kedua, tidak mampu menjelaskan hubungan jangka panjang antar variabel tersebut. Variabel-variabel tersebut hanya mampu menjelaskan hubungan jangka pendek.

Pada prinsipnya dalam melaksanakan estimasi terhadap suatu model, terdapat 4 kasus yang berlaku umum:

- a. Jika hasil pengujian unit root terhadap kedua variabel menunjukkan 2 variabel tersebut tidak mengandung unit root (stasioner pada level), maka teknik regresi standar seperti OLS dapat langsung digunakan.

- b. Bila hasil pengujian unit root menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut terintegrasi pada derajat yang sama, misal pada 1st *difference*, sedangkan dari hasil regresi tersebut residualnya tidak stasioner, maka hasil regresi dari kedua variabel tersebut akan menghasilkan *spurious regression*. Untuk menghindari hal tersebut, maka kedua variabel tersebut diestimasi dalam format turunan pertama.
- c. Bila hasil pengujian kedua variabel tersebut menunjukkan keduanya terintegrasi pada order yang sama dan residual yang dihasilkan stasioner, maka kedua variabel dikatakan terkointegrasi.
- d. Bila kedua variabel tersebut terintegrasi pada derajat yang berbeda, maka kedua variabel tersebut tidak mempunyai hubungan sama sekali (*drifting apart*).

Hipotesis untuk uji derajat integrasi adalah:

H_0 : data tidak stasioner

H_1 : data stasioner

Apabila nilai *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) statistik $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau data stasioner.

3. Uji kointegrasi (keseimbangan jangka panjang)

Tahap selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi digunakan untuk memecahkan masalah data time series yang tidak stasioner. Dasar pendekatan kointegrasi adalah sejumlah data dapat menyimpang dari rata-ratanya dalam jangka pendek, akan bergerak bersama-sama menuju kondisi keseimbangan dalam jangka panjang (*equilibrium*). Uji kointegrasi bertujuan untuk menguji apakah residual regresi yang dihasilkan stasioner atau tidak. Apabila satu atau lebih variabel tidak stasioner, maka variabel tersebut tidak terkointegrasi. Secara ekonomi, dua variabel dikatakan terkointegrasi jika kedua variabel tersebut mempunyai hubungan dalam jangka panjang atau ekuilibrium. Konsep

kointegrasi berkaitan dengan keberadaan keseimbangan jangka panjang dimana sistem ekonomi konvergen sepanjang waktu seperti yang dikehendaki dalam teori dan merupakan cara untuk melakukan uji terhadap teori.

Persyaratan umum untuk menerapkan teknik kointegrasi adalah keharusan adanya kesamaan orde integrasi diantara variabel-variabel yang akan dipakai dalam model regresi kointegrasi.

Uji kointegrasi yang dilakukan adalah uji Engle-Granger (*Augmented Eagle-Granger*) untuk mengetahui residual dari persamaan kointegrasi stasioner atau tidak.

4. Permodelan Koreksi Kesalahan (ECM)

Error Correction Mechanism (ECM) pertama kali digunakan oleh Sargan dan dipopulerkan oleh Eagle dan Granger, mengoreksi ketidakseimbangan (*disequilibrium*). Granger menyatakan bahwa jika dua variabel X dan Y terkointegrasi, hubungan kedua variabel tersebut dapat diekspresikan sebagai ECM.

Model ECM bertujuan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya perubahan struktural. Hal ini karena keseimbangan jangka panjang anantara variabel independen dan variabel dependen yang merupakan hasil uji kointegrasi tidak akan berlaku setiap saat. Oleh karena itu error term yang terdapat pada persamaan yang akan ditaksir harus diperlakukan sebagai keseimbangan kesalahan pengganggu (*equilibrium error*) dalam jangka panjang.

Model ECM dapat dibentuk jika terjadi kointegrasi antar variabel bebas dan variabel terikat yang menunjukkan hubungan jangka panjang/*equilibrium* yang mungkin dalam jangka pendek keduanya tidak mencapai keseimbangan. ECM digunakan untuk menguji spesifikasi model telah sesuai. Apabila parameter ECT (*Error Correction Term*) signifikan secara statistik dan bernilai negatif, maka spesifikasi model dengan ECM sudah tepat. ECT merupakan kesalahan keseimbangan (*error equilibrium*), jika ECT sama

dengan nol (signifikan), maka variabel independennya dalam kondisi keseimbangan.

Langkah merumuskan model ECM adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan spesifikasi model

$$GDP = \alpha + \beta_1 \text{Govex} + \beta_2 \text{PMTB} + \beta_3 \text{PUB} + \beta_4 \text{EMP} + \beta_5 \text{Dummy} + \varepsilon$$

- b. Membentuk fungsi biaya tunggal dalam metode koreksi kesalahan

$$GDP = \beta_1(GDP_t - GDP_{t-1}) + \beta_2\{(GDP_t - GDP_{t-1}) - f_t(Z_t - Z_{t-1})^2\}$$

Berdasarkan data diatas C_t adalah fungsi biaya kuadrat, PDB_t adalah Produk Domestik Bruto pada periode t , sedangkan Z_t merupakan *vector* variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu belanja pemerintah, PMTB, tenaga kerja, investasi pemerintah, serta variabel dummy. Komponen pertama fungsi biaya tunggal di atas merupakan biaya ketidakseimbangan dan komponen kedua merupakan komponen biaya penyesuaian.

- c. Persamaan jangka pendek (ECM)

$$D(PDB) = \beta_0 + \beta_1 D(\text{Govex}) + \beta_2 D(\text{PMTB}) + \beta_3 D(\text{PUB}) + \beta_4 D(\text{EMP}) + \beta_5 \text{Dummy} + \beta_6 \text{ECT}(-1) + \mu$$

Berdasarkan model ECM diatas, parameter β_6 adalah parameter penyesuaian, dimana koefisien koreksi ketidakseimbangan dalam β_6 dalam bentuk nilai absolut menjelaskan seberapa cepat waktu yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan (equilibrium). Sedangkan parameter β_1 β_2 β_3 β_4 dan β_5 menjelaskan pengaruh jangka pendek.

Koefisien β_6 hasil estimasi model ECM diharapkan bertanda negatif. Nilai absolut koefisien β_6 ini menentukan seberapa cepat keseimbangan bisa tercapai kembali bila didapat penyimpangan.

III.5.2 Uji Asumsi Klasik

Ekonometrika memiliki asumsi klasik *Ordinary Least Square* untuk memastikan bahwa model yang dipilih adalah model terbaik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model yang diestimasi telah memenuhi asumsi Gauss Markoff, yaitu BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Setelah diperoleh hasil regresi dengan ECM, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang didapatkan dari sebaran data untuk mengetahui apakah data tersebut memiliki berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah Uji Jarque Berra, dimana jika nilai Jarque Berra mendekati 1 atau probabilitas $> \alpha$ maka data terdistribusi normal.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian ini melihat bagaimana variabel (X) mempengaruhi variabel (Y), baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik.

Uji linieritas yang digunakan adalah uji Ramsey *Regression Equation Specification Error Test* atau uji Ramsey RESET. Jika hasil tes menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari α artinya model nonlinier tidak lebih baik dari model linier. Dengan demikian asumsi linieritas pada model regresi terpenuhi.

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat a dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Dampak dari multikolinearitas a lain:

1. Koefisien *Partial* Regresi tidak terukur secara presisi sehingga nilai *standar error*-nya besar.
2. Perubahan kecil pada data dari sampel ke sampel akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi parsial.
3. Perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi parsial variabel lainnya.
4. Nilai *Confidence Interval* sangat lebar, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian jika dalam penelitian tersebut terdapat multikolinearitas.

Uji multikolinearitas yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melihat nilai *Variance Inflating Factors* (VIF). Jika nilai VIF dibawah 10 dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami masalah multikolinearitas.

d. Uji Autokolinearitas

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel. Korelasi ini terjadi antar waktu atau individu. Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data *time series*, dimana kondisi sekarang dipengaruhi kondisi masa lalu. Uji autokolinearitas yang digunakan adalah uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Jika probabilitas $> \alpha$, maka disimpulkan data tidak mengalami masalah autokorelasi.

e. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi karena varians antar error tidak konsisten sehingga model tidak memenuhi criteria Gauss-Markov

yang umumnya terjadi pada data *cross section*. Akibat adanya heteroskedastisitas adalah:

1. Varians tidak konstan, akibatnya nilai varians lebih besar dari varians taksiran
2. Varians yang besar menyebabkan uji hipotesis (uji F dan uji t) kurang tepat
3. Interval kepercayaan menjadi lebih besar karena standar error yang besar.
4. Kesimpulan (hasil akhir) yang dihasilkan regresi yang dilakukan tidak tepat dan dapat menyesatkan.

Untuk menguji heteroskedastisitas digunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey*. Hipotesis nol untuk uji ini adalah no heterokedastisitas atau homoskedastisitas. Jika probabilitas $> \alpha$, maka terima H_0 yang berarti data tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

III.5.3 Uji Statistik/Uji Hipotesis

Tahap berikutnya yang dilakukan dalam analisis data adalah melakukan uji statistik dan interpretasi kriteria ekonomi. Pengujian hipotesis/uji statistik yang digunakan mencakup:

- a. Uji Koefisien determinansi (R^2)
Uji R^2 digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model regresi. Semakin tinggi R^2 , semakin baik hasil yang diperoleh.
- b. Uji F (uji serempak)
Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dalam model.

c. Uji t (Uji parsial)

Uji t digunakan untuk mendeteksi seberapa baik satu variabel independen secara individual (parsial) dapat menjelaskan variabel independen dalam model.

III.5.4 Evaluasi Kriteria Ekonomi

Evaluasi kriteria ekonomi dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap hasil regresi yang dihasilkan dan mencocokkan hasil penelitian tersebut dengan teori ekonomi. Hubungan variabel dependen dan variabel independen dapat dilihat dari tanda koefisien masing-masing variabel, apakah searah atau berbanding terbalik. Dalam tahap evaluasi ini juga dijelaskan alasan jika hasil pengolahan data tidak sesuai dengan teori ekonomi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

V.1. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah didefinisikan dan hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDB riil perkapita Indonesia.
2. PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB riil perkapita Indonesia.
3. Investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB riil perkapita Indonesia.
4. Tenaga kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDB riil perkapita Indonesia.
5. Reformasi keuangan negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB riil perkapita Indonesia. PDB riil perkapita Indonesia setelah reformasi keuangan negara lebih tinggi dibanding sebelum reformasi keuangan negara.
6. Secara bersama-sama belanja pemerintah, PMTB, investasi pemerintah, tenaga kerja, serta reformasi keuangan negara berpengaruh signifikan terhadap PDB riil perkapita Indonesia.

V.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan diatas penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap PDB riil perkapita Indonesia karena belanja digunakan untuk hal produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun hasil regresi juga menunjukkan dalam bahwa belanja pemerintah tidak signifikan mempengaruhi PDB riil perkapita Indonesia. Secara jumlah, belanja pemerintah relative kecil dibandingkan nilai PDB riil perkapita. Sebagai salah satu komponen pembentuk PDB riil perkapita, kontribusi belanja pemerintah hanya kurang dari 10%.

Belanja pemerintah belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi karena kendala dalam efisiensi belanja, pelaksanaan anggaran, dan korupsi. Dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, kegiatan *Spending Reviu* untuk mengidentifikasi inefisiensi anggaran perlu terus dilanjutkan dan ruang lingkupnya perlu diperluas bukan hanya pada anggaran Kementerian/Lembaga di level pusat, namun juga hingga ke level anggaran di daerah. Hasil *spending reviu* akan membantu mengidentifikasi potensi fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah perlu terus mendorong implementasi *E-government* untuk mengurangi celah penyelewengan anggaran (korupsi).

2. PMTB yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu kebijakan pemerintah meningkatkan anggaran infrastruktur sebagai bagian dari PMTB perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan PDB riil perkapita Indonesia.
3. Jumlah pekerja dalam perekonomian Indonesia berpengaruh positif terhadap PDB riil perkapita. Namun, karena kualitas produktivitas pekerja Indonesia masih relatif rendah, maka daya ungkit tenaga kerja

terhadap PDB riil perkapita Indonesia belum optimal. Pemerintah perlu meningkatkan Program Wajib Belajar yang saat ini baru mencapai 12 Tahun (tingkat SMA) menjadi program Wajib Belajar hingga perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan pekerja Indonesia. Dukungan anggaran pendidikan yang cukup besar agar dapat dioptimalkan untuk mendukung Wajib Belajar hingga perguruan tinggi.

Upaya tersebut juga perlu dikombinasikan dengan memadukan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri (*link and match*). Selain itu, saat ini pemerintah juga menggulirkan program Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan. Program Kampus Merdeka ini perlu terus dilanjutkan dan diperluas untuk memberikan kesempatan lebih banyak orang meningkatkan taraf pendidikannya sehingga mampu bersaing di dunia kerja dan dunia usaha.

Selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menyerap teknologi, pemerintah perlu membekali siswa dan mahasiswa dengan pelatihan teknologi/digital. Dengan demikian ketika siswa/mahasiswa tersebut bekerja kualitas dan produktivitasnya akan meningkat.

4. Reformasi keuangan negara terus dilanjutkan dengan reformasi yang bukan hanya menitikberatkan pada pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Namun reformasi keuangan negara harus juga berfokus pada dampak yang dapat dirasakan masyarakat dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel tersebut. Reformasi juga perlu terus diperluas ke bidang lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi anggaran berbasis kinerja seperti diamanatkan UU No.17 Tahun 2003 juga perlu terus diperbaiki diantaranya melalui analisis standar biaya dan standar pelayanan minimum pada level Kabupaten/Kota/Provinsi.

5. Dalam penelitian ini, variabel belanja pemerintah diproksi secara keseleruhan tanpa membedakan jenis belanjanya. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa beberapa jenis belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB riil perkapita, namun beberapa jenis belanja lainnya justru berpengaruh negatif. Studi empiris juga membuktikan adanya *threshold* belanja pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan PDB riil perkapita. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel belanja pemerintah berdasarkan jenisnya dan menghitung *threshold* agar analisis belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi semakin mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdini, R., & Mandala, M. (2020). Inflation, Government Expenditure, and Economic Growth in Indonesia. *Jambura Equilibrium Journal*, 2(2, July 2020), 109–118. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/equij>
- Al Bataineh, I. M. (2012). the Impact of Government Expenditures on Economic Growth in Jordan. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business*, 4(6), 1320–1338. http://search.proquest.com/docview/1221279940?accountid=12528%5Cnhttp://monashdc05.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/MUA/MUL_SERVICES_PAGE?url_ver=Z39.882004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ:abiglobal&atitle=THE+IMPACT
- Alexiou, C. (2009). Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE). *Journal of Economic and Social Research*, 11(1), 1–16. <https://www.researchgate.net/publication/228647975>
- Alqadi, M., & Ismail, S. (2019). Government Spending and Economic Growth : Contemporary Literature Review. *Journal of Global Economics*, 7(4), 0–4.
- Ambya, A. (2020). How Government Spending on Public Sector Affect The Economic Growth? *JEJAK*, 13(1), 218–229. <https://doi.org/10.15294/jejak.v13i1.21943>
- Ambya, A. (2021). Human Development Index (HDI) in Lampung Province Period 2013-2018. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 4(2), 119. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v4i2.119-128>
- Amri, K. (2017). Pengaruh Pembentukan Modal Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Economac*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/2017119>
- Amri, K., & Aimon, H. (2017). *Pengaruh Pembentukan Modal dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. 1(1), 1–16.
- Aschauer, & Alan, D. (1989). Does Public Capital Crowd Out Private Capital? *Journal of Monetary Economics*, 24(2), 171–188. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(89\)90002-0](https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90002-0)

- Aspian Nur, A. (2019). *MODEL KOREKSI KESALAHAN (Error Correction Model)-ECM* (p. 7). <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/KDTNU>
- Astuti, R. D. (2001). Analisis Makro Kinerja Pasar Modal Indonesia Dengan Pendekatan Error Correction Model (ECM). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 13–32. <https://journal.uui.ac.id/JEP/article/download/6979/6171>
- Bachtiar, H. F., Sofilda, E., & Kusumastuti, S. Y. (2015). Analissi Pengaruh Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat, Pembayaran Bunga Utang , Dan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2013. *Seminar Nasional Cendekiawan*, 682–688.
- Barrios, S., & Schaechter, A. (2018). The Quality of Public Finances and Economic Growth. In *European Commission* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/10.2765/88752>
- Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–443. <https://doi.org/10.2307/2937943>
- Barro, Robert J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S103–S125. <https://doi.org/10.1086/261726>
- Bayhaqi, A. (2006). *Education and economic growth in Indonesia*. National University of Singapore.
- Bénassy, J.-P. (2015). Endogenous Growth. *Macroeconomic Theory*, 180–204. <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780195387711.003.0009>
- Bleaney, M., Gemmell, N., & Kneller, R. (2001). Testing the endogenous growth model: Public expenditure, taxation, and growth over the long run. *Canadian Journal of Economics*, 34(1), 36–57. <https://doi.org/10.1111/0008-4085.00061>
- BPS. (2019). *Penyusunan Komponen PMTB dan Perubahan Inventori pada PDB menurut Pengeluaran , 2019* (Vol. 2).
- Cesarina Maulid, L., Rangga Bawono, I., & Aryo Sudiby, Y. (2021). The Effect of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 24–38. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium>
- Damodar N Gujarati, & Dawn C. Porter. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Dao, M. Q. (2012). Government expenditure and growth in developing countries. *Progress in Development Studies*, 12(1), 77–82. <https://doi.org/10.1177/146499341101200105>
- Devarajan, S., Swarop, V., & Zou, H. (1996). The Composition of Public

- Expenditure and Economic Growth. *Journal of Monetary Economics*, 1(1), 97–117. http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-1107449512766/648083-1108140788422/The_Composition_of_Public_Expenditures_and_Economic_Growth.pdf%0Ahttp://www.serialsjournals.com/archives.php?journals_id=51%5Cnhttp://ezproxy.lib.monash.edu.au/
- Epaphra, M., & Massawe, J. (2016). Investment and economic growth: An empirical analysis for Tanzania. *Turkish Economic Review*, 3(4), 578–609. <https://doi.org/10.1453/ter.v3i4.1019>
- Ghali, K. H. (1997). Government Spending and Economic Growth in Saudi Arabia * 1. *JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT*, 22(2).
- Hadi, Y. S., Wardhana, W., Kapiyadi, A. Y., Sapari, R. A., Nawawi, A., & Wurjanto. (2014). Postur APBN Indonesia. In *Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Hansson, P., & Henrekson, M. (1994). A new framework for testing the effect of government spending on growth and productivity. *Public Choice*, 81(3–4), 381–401. <https://doi.org/10.1007/BF01053239>
- Hasnul, A. G. (2016). The effects of government expenditure on economic growth: the case of Malaysia. *MPRA Paper*, 71254.
- Jahan, S., Mahmud, A. S., & Papageorgiou, C. (2014). What is Keynesian economics? *Finance and Development*, 51(3), 53–54.
- Juanda, B., & Junaidi, J. (2012). *Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*.
- K.C, O., Chukwu, & P.A, O. (2018). The effect of public expenditure on economic growth in Nigeria (1980-2013). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 9(4).
- Kharisma, B., & Pratikto, A. (2019). Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Analisis Panel Seemingly Unrelated Regression. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(1), 1–22.
- Lee, J. C., Won, Y. J., & Jei, S. Y. (2019). Study of the relationship between government expenditures and economic growth for China and Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 11(22). <https://doi.org/10.3390/su11226344>
- Lilian, N. (2020). *Impacts of Higher Education Enrollment on Economic Growth in Uganda*. Ritsumeikan Asia Pacific University.
- Loizides, J., & Vamvoukas, G. (2005). GOVERNMENT EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM TRIVARIATE CAUSALITY TESTING. *Journal of Applied Economics*, VIII(1), 125–152.
- Mazurova, B., & Kollar, J. (2015). the Importance of Government Spending in

Context of Fiscal Policy. *Proceedings of the 1st International Conference European Fiscal Dialog 2015: Current Issues of Fiscal Policy, July 2017.*

- Mankiw Gregory, N., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407–437. <https://doi.org/10.2307/2118477>
- McCarthy, C. (2005). PRODUCTIVITY PERFORMANCE IN DEVELOPING COUNTRIES - Country case studies South Africa. *Growth (Lakeland)*, November.
- Merini, Dian. (2013). Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Di Kawasan Asia Tenggara: Aplikasi Data Envelopment Analysis. `Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Mitchell, D. J. (2005). The impact of government spending on economic growth. *Backgrounder The Heritage Foundation*, 1831(1), 109–118. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n1p109>
- Mo, P. H. (2007). Government Expenditures and Economic Growth: The Supply and Demand Sides. *Fiscal Studies*, 28(4), 497–522. <http://www.jstor.org/stable/24440029>
- Mudaki, J., & Masaviru, W. (2012). Does The Composition of Public Expenditure matter to Economic Growth for Kenya? *Journal of Economics and Sustainable Development Wwww.Iiste.Org ISSN*, 3(3). www.iiste.org
- Muhammad Sohail, R., Rabnawaz, A., & Muhammad Sohail Jafar, R. (2015). Impact of Public Investment on Economic Growth.South Asia Journal of Multidisciplinary Studies (SAJMS), 1(8), 62-75. *Munich Personal RePEc Archive*, 70377.
- Nurudeen, A., & Usman, A. (2010). Government Expenditure And Economic Growth In Nigeria, 1970-2008: A Disaggregated Analysis. *Business and Economics Journal*, 1(1), 1–11.
- Nyasha, S., & Odhiambo, N. M. (2019). The Impact of Public Expenditure on Economic Growth: A Review of International Literature. *Folia Oeconomica Stetinensia*, 19(2), 81–101. <https://doi.org/10.2478/fofi-2019-0015>
- Phetsavong, K., & Ichihashi, M. (2012). The Impact of Public and Private Investment on Economic Growth: Evidence from Developing Asian Countries. *IDECDiscussion Paper 2012*, 1–10. <https://home.hiroshima-u.ac.jp/~ichi/Kongphet2012.pdf>
- Pula, L., & Elshani, A. (2018). Role of Public Expenditure in Economic Growth: Econometric Evidence from Kosovo 2002–2015. *Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management*, 6(1), 74–87. <https://doi.org/10.2478/bjreecm-2018-0006>

- Pyo, H. (1995). A Time-Series Test of the Endogenous Growth Model with Human Capital. *Growth Theories in Light of the East Asian Experience*, ..., 4(January), 229–245. <http://www.nber.org/chapters/c8551.pdf>
- Ramayandi, A. (2003). Economic Growth And Government Size in Indonesia: Some Lessons For The Local Authority. In *Working Paper in Economics and Development Study* (Issue 200302).
- Robert J. Barro, 1996. "Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study," NBER Working Papers 5698, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Safari, M. F., & Fikri, A. A. H. S. (2016). *ANALISIS PENGARUH EKSPOR, PEMBENTUKAN MODAL, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA*.
- Salihin, A. (2020). Pengaruh Pengeluaran, Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Ecodemica*, 4(1), 77–84.
- Sall, S. (2014). *Does corruption have a significant effect on economic growth?* Sodertorns University.
- Santika, A. R., & Qibthiyah, R. M. (2020). Government Size dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 212–230. <https://doi.org/10.21002/jepi.v20i2.975>
- Siefu, D. D., Njocke, M., & Yah, N. C. (2018). Government Spending and Economic Growth in Cameroon. *European Scientific Journal, ESJ*, 14(28), 68. <https://doi.org/10.19044/esj.2018.v14n28p68>
- Spending Review. (2017). *Spending Review 2017*. <https://www.gov.uk/government/topical-events/autumn-statement-and-spending-review-2015>
- Sudarsono, H. (2010). THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND GOVERNMENT SPENDING: A CASE STUDY OF OIC COUNTRIES. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 11, Issue 2).
- Suliantoro, I. (2020). Duplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(2), 16–30. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1025>
- Suryanto, S., & Kurniati, P. S. (2019). Tinjauan Perubahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(2). <https://doi.org/10.20527/jpp.v1i2.2441>
- Vedia-Jerez, D. H., & Chasco, C. (2016). Long-run determinants of economic growth in south america. *Journal of Applied Economics*, 19(1), 169–192. [https://doi.org/10.1016/S1514-0326\(16\)30007-1](https://doi.org/10.1016/S1514-0326(16)30007-1)
- Wahyuni, H. (2015). the Role of Government in Economic Growth: Evidence From

Asia and Pacific Countries. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 19(1), 71–81. <https://doi.org/10.22146/jieb.6590>

Widiastuti, Nur, Saleh, S. (2019). Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ekonomi: Studi Kasus Panel Data. *Bina Ekonomi*, 23(1), 13–28.